



**DINAS**

**KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN**

**KABUPATEN KUBU RAYA**

# **RENSTRA PD**

# **2025-2026**

**2025-2026**



## KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmat dan hidayah-Nya, dokumen Rencana Strategis (Renstra) Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Kubu Raya Tahun 2025–2026 dapat disusun dengan baik.

Renstra ini merupakan dokumen perencanaan yang berfungsi sebagai pedoman dalam pelaksanaan program dan kegiatan Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian selama periode dua tahun ke depan. Dokumen ini disusun dengan mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kubu Raya serta berbagai kebijakan nasional dan daerah terkait ketahanan pangan dan pertanian.

Dalam Renstra ini, tujuan, sasaran, serta strategi yang bertujuan untuk meningkatkan ketahanan pangan, memperkuat sektor pertanian, serta mendorong kesejahteraan petani dan masyarakat. Kami berharap dokumen ini dapat menjadi acuan bagi seluruh pemangku kepentingan dalam mewujudkan pembangunan pertanian yang berkelanjutan, berdaya saing, dan berkontribusi terhadap kesejahteraan masyarakat Kubu Raya.

Kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah berkontribusi dalam penyusunan Renstra ini, baik dari jajaran pemerintah daerah, akademisi, praktisi, maupun masyarakat yang telah memberikan masukan berharga. Semoga dokumen ini dapat menjadi pedoman yang bermanfaat dan dapat diimplementasikan dengan optimal demi kemajuan ketahanan pangan dan pertanian di Kabupaten Kubu Raya.

Sungai Raya, 27 Februari 2025

Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian  
Kabupaten Kubu Raya



**Awaluddin, SP.**  
Pembina Tingkat I  
NIP. 19740520 200003 1 005

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
DAFTAR ISI.....	ii
DAFTAR TABEL .....	iv
DAFTAR GAMBAR.....	v
BAB 1. PENDAHULUAN .....	1
1.1. Latar Belakang.....	1
1.2. Landasan Hukum .....	2
1.3. Maksud dan Tujuan.....	6
1.3.1. Maksud.....	6
1.3.2. Tujuan .....	6
1.4. Sistematika Penulisan.....	6
BAB 2 GAMBARAN PELAYANAN BIDANG URUSAN.....	8
2.1. Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja. .	8
2.1.1. Kedudukan dan Tugas Fungsi Dinas. ....	8
2.1.2. Susunan Organisasi Dinas.....	8
2.1.3. Kepala Dinas.....	9
2.1.4. Sekretariat .....	9
2.1.5. Sub Bagian Tata Usaha dan Kepegawaian.....	10
2.1.6. Bidang Ketahanan Pangan .....	11
2.1.7. Bidang Tanaman Pangan .....	11
2.1.8. Bidang Hortikultura .....	12
2.1.9. Bidang Penyuluhan.....	13
2.1.10. Bidang prasarana dan Sarana Pertanian.....	14
2.1.11. Unit Pelaksana Teknis.....	14
2.1.12. Kelompok Jabatan Fungsional .....	15
2.2. Sumber Daya Dinas .....	15
2.2.1. Sumber Daya Manusia.....	16
2.2.2. Sumber Daya Penyuluhan.....	19
2.2.3. Sumber Daya Lahan .....	20
2.3. Kinerja Pelayanan Dinas Pertanian .....	29
2.3.1. Capaian Kinerja DKPP KKR.....	29
2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan .....	50
2.4.1. Penyebab Capaian Kinerja Tidak Terpenuhi .....	50
2.4.2. Peluang Pengembangan Pelayanan .....	52
2.4.2. Peluang Pengembangan Pelayanan .....	52
BAB 3 PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS .....	53

3.1. Identifikasi Permasalahan .....	53
3.2. Penentuan Isu-Isu Strategis .....	59
BAB 4. TUJUAN DAN SASARAN .....	62
4.1. Tujuan dan Sasaran.....	62
BAB 5. STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN .....	65
5.1. Penentuan Strategi dan Arah Kebijakan.....	65
BAB 6. PROGRAM, KEGIATAN DAN PENDANAAN.....	74
6.1. Rencana Program Prioritas dan Penunjang .....	74
6.2. Pendanaan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan.....	91
BAB 7. KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN.....	97
7.1. Indikator Sasaran dan Definisi Operasional .....	97
7.2. Indikator Program dan Definisi Operasional.....	98
BAB 8. PENUTUP .....	105
8.1. Kesimpulan.....	105
8.2. Penutup. ....	105

## DAFTAR TABEL

Tabel 1. Jumlah Pegawai Berdasarkan Pendidikan .....	16
Tabel 2. Jumlah Pegawai Berdasarkan Golongan .....	16
Tabel 3. Jumlah Pegawai Berdasarkan Jabatan .....	18
Tabel 4. Sebaran Kelompok Tani Berdasar Kelas Kelompok .....	19
Tabel 5. Data Rasio Kelompok Tani dan Penyuluh Lapangan .....	20
Tabel 6. Luas Lahan Pertanian Menurut Kecamatan.....	20
Tabel 7. Lahan Pertanian di Kecamatan Batu Ampar .....	22
Tabel 8. Lahan Pertanian di Kecamatan Terentang .....	22
Tabel 9. Lahan Pertanian di Kecamatan Kubu .....	23
Tabel 10. Lahan Pertanian di Kecamatan Teluk Pakedai .....	24
Tabel 11. Lahan Pertanian di Kecamatan Sungai Kakap .....	25
Tabel 12. Lahan Pertanian di Kecamatan Rasau Jaya .....	26
Tabel 13. Lahan Pertanian di Kecamatan Sungai Raya .....	26
Tabel 14. Lahan Pertanian di Kecamatan Sungai Raya .....	28
Tabel 15. Lahan Pertanian di Kecamatan Kuala Mandor B.....	29
Tabel 16. Capaian Kinerja .....	30
Tabel 17. Realisasi Anggaran DKPP 2019 - 2023.....	31
Tabel 18 Tujuan dan Sasaran .....	63
Tabel 19. Strategi dan Arah Kebijakan .....	71
Tabel 20. Rencana program dan kegiatan Urusan Pangan .....	74
Tabel 21. Rencana program dan kegiatan Urusan penunjang pemerintahan .....	80
Tabel 22. Rencana program dan kegiatan Urusan Pertanian .....	87
Tabel 23 Indikator Kinerja Utama .....	97
Tabel 24 Indikator Kinerja Program.....	99

**DAFTAR GAMBAR**

Gambar 1. Struktur Organisasi..... 16

## **BAB 1. PENDAHULUAN**

### **1.1. Latar Belakang**

Ketahanan pangan dan pertanian memegang peran krusial dalam menjaga kesejahteraan masyarakat dan keberlanjutan ekonomi suatu Daerah. Sebagai fondasi utama penyediaan pangan dan sumber daya kehidupan, sektor ini tidak hanya berkontribusi pada pemenuhan kebutuhan dasar, tetapi juga menjadi pendorong utama pertumbuhan ekonomi. Dalam konteks global yang terus berubah, tantangan terkait perubahan iklim, pertumbuhan populasi, dan perubahan pola konsumsi menyoroti urgensi untuk merancang strategi dan kebijakan yang berfokus pada ketahanan pangan. Pertanian, melibatkan tanaman pangan, hortikultura, dan peternakan, bukan hanya tentang produksi makanan, tetapi juga tentang membangun fondasi yang kokoh untuk pengembangan ekonomi nasional. Ketahanan pangan berarti tidak hanya memastikan ketersediaan pangan yang memadai tetapi juga memperhitungkan aksesibilitas, keamanan, dan kesehatan pangan bagi semua lapisan masyarakat. Seiring dengan itu, pertanian juga menjadi tulang punggung untuk pertumbuhan industri hulu dan hilir, menciptakan lapangan kerja, sumber pendapatan, dan mendukung produk domestik regional bruto (PDRB).

Rencana Strategis (Renstra) Ketahanan Pangan dan Pertanian tahun 2025-2026 menjadi landasan penting dalam menghadapi dinamika kompleks sektor pertanian dan ketahanan pangan. Saat ini, tantangan global seperti perubahan iklim, pertumbuhan populasi, dan transformasi pola konsumsi menuntut respons yang berkesinambungan untuk memastikan keberlanjutan dan keamanan pangan.

Sementara pertanian tetap menjadi tulang punggung perekonomian banyak negara, termasuk Indonesia, perluasan dan peningkatan produktivitas menjadi esensial untuk memenuhi kebutuhan pangan yang terus berkembang. Rencana Strategis ini mencerminkan komitmen untuk meningkatkan daya saing sektor pertanian, menghadapi risiko iklim, dan menciptakan ketahanan pangan yang berkelanjutan.

Dengan mempertimbangkan peran vital pertanian dalam mendukung penghidupan masyarakat, peningkatan kesejahteraan petani, dan memajukan ekonomi nasional, Renstra 2025-2026 dirancang untuk menjadi

panduan yang komprehensif. Ini mencakup peningkatan infrastruktur, teknologi pertanian, pemberdayaan petani, dan kebijakan yang mendukung pertumbuhan yang berkelanjutan.

## **1.2. Landasan Hukum**

Dasar hukum yang digunakan dalam penyusunan Renstra, adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 18 ayat (6);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
5. Undang Undang Nomor 24 tahun 2007 Tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723)
6. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
7. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Kubu Raya di Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4751);
8. Undang Undang Nomor 24 tahun 2007 Tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038)



9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
10. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6056);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);

16. Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Pulau Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 10);
17. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
18. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Stunting (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 172);
19. Intruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2022 tentang Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem.
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 nomor 1312);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2020 tentang Tata Kerja Serta Pembinaan Kelembagaan dan Sumber Daya Manusia Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Ekstrem Provinsi dan Tim koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Ekstrem Kab/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 794);

25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
26. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
27. Intruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2023 Tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah Dengan Periode Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Berahir Pada Tahun 2024
28. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 10 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2014-2034 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2014 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 8);
29. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 3 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Kalimantan Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2016 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 3);
30. Peraturan Gubernur Kalimantan Barat Nomor 9 Tahun 2023 Tentang Rencana Pembangunan Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2024-2026 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2023 Nomor 12)
31. Peraturan Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 16 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Kabupaten Kubu Raya Tahun 2009-2029 (Lembaran Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun 2009 Nomor 16);
32. Peraturan Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 6) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 10 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat

- Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun 2021 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 82);
33. Peraturan Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 7 Tahun 2016 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kubu Raya Tahun 2016-2036 (Lembaran Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun 2016 Nomor 43);
34. Peraturan Bupati Kabupaten Kubu Raya Nomor 105 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Kubu Raya; (

**1.3. Maksud dan Tujuan**

**1.3.1. Maksud**

Rencana strategis Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Kubu Raya Tahun 2025-2026 dimaksudkan sebagai penjabaran Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun 2025-2026, sebagai dokumen perencanaan pembangunan pertanian tanaman pangan dan hortikultura di Kabupaten Kubu Raya, yang menjadi arah kebijakan pembangunan pertanian tanaman pangan dan hortikultura dari tahun 2025 sampai dengan tahun 2026.

**1.3.2. Tujuan**

Rencana Strategis Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Kubu Raya Tahun 2025-2026 sebagai dokumen untuk pedoman pencapaian target Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun 2025-2026, sesuai Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Kubu Raya.

**1.4. Sistematika Penulisan**

Renstra Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Kubu Raya Tahun 2025-2026 disusun dengan sistematika penulisan sebagai berikut :

<b>BAB 1</b>	<b>PENDAHULUAN</b>  Bab ini menguraikan tentang latar belakang dilakukan penyusunan rencana strategis, landasan hukum penyusunan, dan sistematika tulisan.
<b>BAB 2</b>	<b>GAMBARAN PELAYANAN BIDANG URUSAN</b>  Bab ini memuat informasi tentang peran (tugas dan fungsi) PD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah, mengulas secara ringkas apa saja sumber daya yang dimiliki PD dalam penyelenggaraan tugas dan fungsinya, mengemukakan capaian-capaian penting yang telah dihasilkan melalui pelaksanaan RENSTRA-PD periode sebelumnya, mengemukakan capaian program prioritas PD yang telah dihasilkan melalui pelaksanaan RPJMD periode sebelumnya, dan mengulas hambatan-hambatan utama yang masih dihadapi dan dinilai perlu

	diatasi melalui RENSTRA-PD ini, serta membahas kelompok sasaran layanan.
<b>BAB 3</b>	<b>PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS</b>  Bab ini memaparkan identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian, , telaah renstra Kementerian Pertanian, telaah Rencana Tata Ruang dan Lingkungan Hidup Strategis dan penentuan isu-isu strategis.
<b>BAB 4</b>	<b>TUJUAN DAN SASARAN</b>  Bab ini memaparkan tujuan dan sasaran Renstra PD tahun 2025-2026 yang penentuannya berdasarkan pada tupoksi PD ,norma, standar, prosedur, dan kriteria (NSPK) yang ditetapkan oleh pemerintah pusat sesuai kewenangan daerah. Didalam bab ini juga memaparkan <i>cascading</i> kinerja PD mulai dari tujuan, sasaran, <i>outcome</i> , dan <i>output</i> serta indikator masing masing.
<b>BAB 5</b>	<b>STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN</b>  Bab ini memaparkan strategi serta kebijakan yang merupakan indikasi nama program dan kegiatan
<b>BAB 6</b>	<b>RENCANA PROGRAM, KEGIATAN SUBKEGIATAN DAN PENDANAAN</b>  Bab ini memaparkan tentang rencana program menurut pembagian urusan kewenangan daerah, indikator kerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif.
<b>BAB 7</b>	<b>KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN</b>  Bab ini menjelaskan indikator yang harus dipenuhi oleh Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Kubu Raya.
<b>BAB 8</b>	<b>PENUTUP</b>  Bab ini menjelaskan secara singkat tentang peran dari dokumen renstra.

## **BAB 2 GAMBARAN PELAYANAN BIDANG URUSAN**

## **2.1. Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja.**

### **2.1.1. Kedudukan dan Tugas Fungsi Dinas.**

#### 2.1.1.1. Kedudukan

Dinas merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah, dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

#### 2.1.1.2. Tugas dan Fungsi

Dinas mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar dibidang pangan, dan urusan pemerintahan pilihan yang berkaitan dengan bidang pertanian.

Dinas mempunyai fungsi sebagai berikut:

- a. Penyusunan program kerja dibidang ketahanan pangan dan pertanian.
- b. Perumusan kebijakan dibidang ketahanan pangann dan pertanian.
- c. Penyelenggaraan kebijakan dan penyelenggaraan urusan pemerintahan serta pelayanan umum dibidang ketahanan pangan dan pertanian.
- d. Penyelenggaraan administrasi Dinas.
- e. Pembinaan dan penyelenggaraan tugas dibidang ketahanan pangan dan pertanian.
- f. Pembinaan unit pelaksana teknis dinas.
- g. Pengkoordinasian, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang ketahanan pangan dan pertanian.
- h. Penyelenggaraan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

### **2.1.2. Susunan Organisasi Dinas.**

Susunan Organisasi Dinas terdiri dari:

- a. Kepala Dinas
- b. Sekerariat.
- c. Bidang Ketahanan Pangan.
- d. Bidang Tanaman Pangan.
- e. Bidang Hortikultura.
- f. Bidang Penyuluhan.

- g. Bidang Prasarana dan Sarana Pertanian
- h. Unit Pelaksana Teknis.
- i. Kelompok Jabatan Fungsional.

### **2.1.3. Kepala Dinas**

#### **2.1.3.1. Tugas.**

Kepala Dinas merupakan unsur pimpinan yang mempunyai tugas memimpin, mengkoordinasikan, merumuskan, membina, mengarahkan, mengevaluasi, mengawasi, melaporkan dan melaksanakan kegiatan Dinas berdasarkan kebijakan Bupati dan peraturan perundang-undangan.

#### **2.1.3.2. Fungsi.**

Fungsi Kepala Dinas mempunyai fungsi:

- a. Perumusan dan penetapan sasaran strategis Dinas.
- b. Perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis Dinas.
- c. Pelaksanaan pembinaan, pengendalian dan pengawasan pelaksanaan tugas dan kegiatan sekretariat dan bidang-bidang Dinas.
- d. Pengarahan pelaksanaan program kerja Dinas.
- e. Pengkoordinasian penyelenggaraan program bidang ketahanan pangan dan pertanian.
- f. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan urusan pemerintahan bidang ketahanan pangan dan pertanian.
- g. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

### **2.1.4. Sekretariat**

#### **2.1.4.1. Tugas.**

Sekretariat mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis, koordinasi, pembinaan dan penyelenggaraan tugas dibidang rencana kerja dan keuangan, tata usaha dan kepegawaian, serta perlengkapan dan umum.

Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

#### **2.1.4.2. Fungsi.**

Sekretariat mempunyai fungsi:

- a. Perencanaan dan penyusunan program operasional kerja Dinas.



- b. Pembagian tugas, pemberian petunjuk kerja, penyeliaan dan mengatur penyelenggaraan tugas di Dinas sesuai lingkup tugasnya.
- c. Penyiapan bahan perumusan kebijakan dibidang rencana kerja dan keuangan, tata usaha dan kepegawaian, serta perlengkapan dan umum.
- d. Penyelenggaraan kegiatan, fassilitasi, koordinasi dan pembinaan sesuai dengan lingkup tugasnya.
- e. Pengendalian kegiatan di DIInas.
- f. Penyelenggaraan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas di DIInas.
- g. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

#### **2.1.5. Sub Bagian Tata Usaha dan Kepegawaian**

##### **2.1.5.1. Tugas.**

Sekretariat membawahi Sub Bagian Tata Usaha dan Kepegawaian. Sub Bagian dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.

Sub Bagian Tata Usaha dan Kepegawaian mempunyai tugas mengumpul dan mengolah bahan perumusan kebijakan pelaksanaan tugas tata usaha dan kepegawaian.

##### **2.1.5.2. Fungsi.**

Sub Bagian Tata Usaha dan Kepegwaian mempunyai fungsi:

- a. Perencanaan dan penyusunan program kegiatan di Sub Bagian Tata Usaha dan Kepegawaian.
- b. Penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan daerah bidang tata usaha dan kepegawaian.
- c. Pengorganisasian, pengumpulan dan pengolahan bahan perumusan kebijakan pembinaan penyelenggaraan tugas tata usaha dan kepegawaian.
- d. Penyiapan bahan perumusan kebijakan daerah dibidang tata usaha dan kepegawaian.
- e. Penyiapan bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah bidang tata usaha dan kepegawaian.
- f. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

### **2.1.6. Bidang Ketahanan Pangan**

#### **2.1.6.1. Tugas.**

Bidang Ketahanan Pangan mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis, koordinasi, pembinaan dan penyelenggaraan tugas dibidang ketersediaan dan kerawanan pangan, distribusi dan cadangan pangan, serta penganekaragaman konsumsi dan keamanan pangan.

Bidang Ketahanan Pangan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.

#### **2.1.6.2. Fungsi.**

Bidang Ketahanan Pangan mempunyai fungsi:

- a. Perencanaan dan penyusunan program operasional kerja Bidang Ketahanan Pangan.
- b. Pembagian tugas, pemberian petunjuk kerja, penyeliaan dan mengatur penyelenggaraan tugas di Bidang Ketahanan Pangan sesuai lingkup tugasnya.
- c. Penyiapan bahan perumusan kebijakan dibidang ketersediaan dan kerawanan pangan, distribusi dan cadangan pangan, serta penganekaragaman konsumsi dan keamanan pangan.
- d. Penyelenggaraan kegiatan, fasilitasi, koordinasi dan pembinaan sesuai dengan lingkup tugasnya.
- e. Pengendalian kegiatan di Bidang Ketahanan Pangan.
- f. Penyelenggaraan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas di Bidang Ketahanan Pangan.
- g. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

### **2.1.7. Bidang Tanaman Pangan**

#### **2.1.7.1. Tugas.**

Bidang Tanaman Pangan mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis, koordinasi, pembinaan dan penyelenggaraan tugas dibidang pembenihan dan produksi tanaman pangan, pengolahan dan pemasaran hasil pertanian tanaman pangan, serta perlindungan tanaman pangan.

Bidang Tanaman Pangan dipimpin seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

#### 2.1.7.2. Fungsi.

Bidang Tanaman Pangan mempunyai fungsi:

- a. Perencanaan dan penyusunan program operasional kerja di Bidang Tanaman Pangan.
- b. Pembagian tugas, pemberian petunjuk kerja, penyeliaan dan mengatur penyelenggaraan tugas di Bidang Tanaman Pangan sesuai lingkup tugasnya.
- c. Penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang pembenihan dan produksi tanaman pangan, pengolahan dan pemasaran hasil pertanian tanaman pangan, serta perlindungan tanaman pangan.
- d. Penyelenggaraan kegiatan, fasilitasi, koordinasi dan pembinaan sesuai dengan lingkup tugasnya.
- e. Pengendalian kegiatan di bidang Tanaman Pangan.
- f. Penyelenggaraan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas di Bidang Tanaman Pangan.
- g. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

#### **2.1.8. Bidang Hortikultura**

##### 2.1.8.1. Tugas.

Bidang Hortikultura mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis, koordinasi, pembinaan dan penyelenggaraan tugas di bidang pembenihan dan produksi tanaman pangan, pengolahan dan pemasaran hasil pertanian hortikultura, serta perlindungan tanaman hortikultura.

Bidang Hortikultura dipimpin seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

##### 2.1.8.2. Fungsi.

Bidang Hortikultura mempunyai fungsi:

- h. Perencanaan dan penyusunan program operasional kerja di Bidang Hortikultura.
- a. Pembagian tugas, pemberian petunjuk kerja, penyeliaan dan mengatur penyelenggaraan tugas di Bidang Hortikultura sesuai lingkup tugasnya.
- b. Penyiapan bahan perumusan kebijakan dibidang pembenihan dan produksi tanaman pangan, pengolahan dan pemasaran hasil pertanian hortikultura, serta perlindungan tanaman hortikultura.
- c. Penyelenggaraan kegiatan, fasilitasi, koordinasi dan pembinaan sesuai dengan lingkup tugasnya.
- d. Pengendalian kegiatan dibidang Hortikultura.
- e. Penyelenggaraan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas di Bidang Hortikultura.
- f. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

#### **2.1.9. Bidang Penyuluhan**

##### **2.1.9.1. Tugas.**

Bidang Penyuluhan mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis, koordinasi, pembinaan dan penyelenggaraan tugas dibidang program dan evaluasi, penyelenggaraan penyuluhan, serta kelembagaan dan ketenagaan penyuluhan.

Bidang Penyuluhan dipimpin seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

##### **2.1.9.2. Fungsi.**

Bidang Penyuluhan mempunyai fungsi:

- a. Perencanaan dan penyusunan program operasional kerja di Bidang Penyuluhan.
- b. Pembagian tugas, pemberian petunjuk kerja, penyeliaan dan mengatur penyelenggaraan tugas di Bidang Penyuluhan sesuai lingkup tugasnya.
- c. Penyiapan bahan perumusan kebijakan dibidang program dan evaluasi, penyelenggaraan penyuluhan, serta kelembagaan dan ketenagaan penyuluhan.
- d. Penyelenggaraan kegiatan, fasilitasi, koordinasi dan pembinaan sesuai dengan lingkup tugasnya.
- e. Pengendalian kegiatan dibidang Penyuluhan.

- f. Penyelenggaraan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas di Bidang Penyuluhan.
- g. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

#### **2.1.10. Bidang prasarana dan Sarana Pertanian**

##### **2.1.10.1 Tugas.**

Bidang Prasarana dan Sarana Pertanian mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis, koordinasi, pembinaan dan penyelenggaraan tugas dibidang perluasan dan perlindungan lahan, irigasi pertanian dan pembiayaan, serta alat mesin pertanian, pupuk dan pestisida.

Bidang Prasarana dan Sarana Pertanian dipimpin seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

##### **2.1.10.2. Fungsi.**

Bidang Prasarana dan Sarana Pertanian mempunyai fungsi:

- a. Perencanaan dan penyusunan program operasional kerja di Bidang Prasarana dan Sarana Pertanian.
- b. Pembagian tugas, pemberian petunjuk kerja, penyeliaan dan mengatur penyelenggaraan tugas di Bidang Prasarana dan Sarana Pertanian sesuai lingkup tugasnya.
- c. Penyiapan bahan perumusan kebijakan dibidang perluasan dan perlindungan lahan, irigasi pertanian dan pembiayaan, serta alat mesin pertanian, pupuk dan pestisida.
- d. Penyelenggaraan kegiatan, fasilitasi, koordinasi dan pembinaan sesuai dengan lingkup tugasnya.
- e. Pengendalian kegiatan dibidang Prasarana dan Sarana Pertanian.
- f. Penyelenggaraan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas di Bidang Prasarana dan Sarana Pertanian.
- g. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

#### **2.1.11. Unit Pelaksana Teknis**

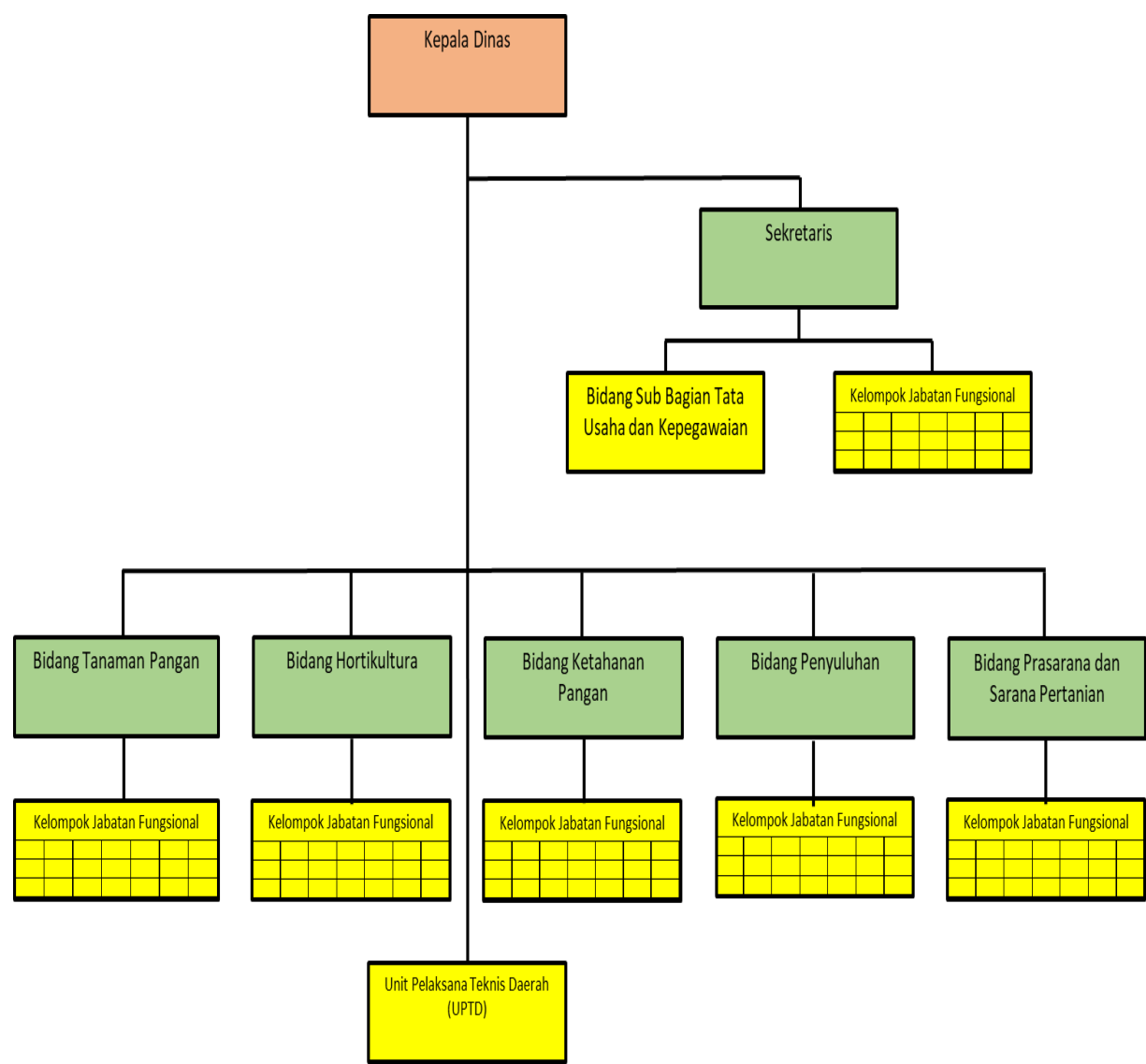
Unit Pelaksana Teknis Dinas mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas teknis Dinas yang wilayah kerjanya meliputi 1 (satu) atau beberapa kecamatan.

Unit Pelaksana Teknis Dinas dipimpin oleh seorang Kepala Unit Pelaksana Teknis yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

2.1.12. Kelompok Jabatan Fungsional

Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah Pegawai ASN dalam jenjang Jabatan Fungsional tertentu berdasarkan keahlian dan keterampilan tertentu.

Gambar 1. Struktur Organisasi



Sumber: Peraturan Bupati Kubu Raya No 105 Tahun 2021

2.2. Sumber Daya Dinas

Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Kubu Raya dalam menjalankan tugas dan fungsi maka diperlukan ketersediaan sumber daya

pembangunan yang memadai. Pengembangan dan peningkatan sumber daya manusia, ketersediaan sarana dan prasarana, serta sumberdaya penunjang/pendukung lainnya diperlukan untuk memenuhi kebutuhan minimal. Kondisi ketersediaan sumberdaya manusia dan sarana pendukung dalam melaksanakan tugas dan fungsi Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Kubu Raya, sebagai berikut:

**2.2.1. Sumber Daya Manusia**

Jumlah pegawai Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Kubu Raya sebanyak 149 orang dengan perincian berdasarkan kualifikasi pendidikan (seperti Tabel 1), berdasarkan golongan (seperti Tabel 2) dan berdasarkan Jabatan (seperti Tabel 3) sebagai berikut.

Tabel 1. Jumlah Pegawai Berdasarkan Pendidikan

No	Tingkat Pendidikan	Jenis Kelamin		Jumlah
		Laki-Laki	Perempuan	
1	Sekolah Dasar	0	0	0
2	SLTP	0	0	0
3	SLTA	20	5	25
4	Diploma 1	0	0	0
5	Diploma 2	0	0	0
6	Diploma 3	10	10	20
7	Diploma 4	0	0	0
8	Sarjana Strata 1	48	33	81
9	Pasca Sarjana Strata 2	12	6	18
	Jumlah	90	54	144

Sumber: Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian (2023)

Tabel 2. Jumlah Pegawai Berdasarkan Golongan

No	Golongan	Jumlah (Orang)		Jumlah (Orang)
		Laki-Laki	Perempuan	
1	Golongan I	0	0	0

	I/a	0	0	0
	I/b	0	0	0
	I/c	0	0	0
	I/d	0	0	0
2	Golongan II	8	3	11
	II/a	1	0	1
	II/b	0	0	0
	II/c	0	1	1
	II/d	7	2	9
3	Golongan III	34	20	54
	III/a	11	1	12
	III/b	5	6	11
	III/c	7	5	12
	III/d	11	8	19
4	Golongan IV	14	7	21
	IV/a	10	6	16
	IV/b	3	1	4
	IV/c	1	0	1
	IV/d	0	0	0
5	Golongan PPPK	9	7	16
	IX	6	6	12
	VII	1	0	1
	V	2	1	3
6	Non Golongan (Non ASN)	25	17	42
	Jumlah	90	54	144

Sumber: Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian (2023)



Tabel 3. Jumlah Pegawai Berdasarkan Jabatan

No	Jenis Jabatan	Gol.	Jumlah (Orang)		Jumlah (Orang)
			Laki-Laki	Perempuan	
1	Struktural		6	2	8
		I	0	0	0
		II	0	0	0
		III	2	0	2
		IV	4	2	6
2	Fungsional Umum (Pelaksana)		7	4	11
		I	0	0	0
		II	3	1	4
		III	4	3	7
		IV	0	0	0
3	Fungsional Tertentu		42	24	66
		I	0	0	0
		II	5	2	7
		III	28	17	45
		IV	9	5	14
4	PPPK		9	7	16
		IX	6	6	12
		VII	1	0	1
		V	2	1	3
5	Tenaga Administrasi (Non ASN)		25	17	42
	Jumlah		89	54	143

Sumber: Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian (2023)

2.2.2. Sumber Daya Penyuluhan

PPL terbagi menjadi dua yaitu PPL pegawai dan PPL Swadaya. Jumlah PPL dari Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian adalah 60 orang dan 68 PPL swadaya. PPL tersebar di 9 Kecamatan untuk melayani petani yang tergabung dalam Kelompok Tani. Saat ini Kelompok Tani yang terdapat di Kabupaten Kubu Raya sebanyak 1884 kelompok. Data kelompok tani tersebut diambil dari SIMLUHTAN.

Tabel 4. Sebaran Kelompok Tani Berdasar Kelas Kelompok










No	Kecamatan	Poktan	Kelas Kelompok				
			Pemula	Lanjut	Madya	Utama	Belum Diketahui
1	Batu Ampar	<div><div></div></div> 200	<div><div></div></div> 148	<div><div></div></div> 34	<div><div></div></div> 15	0	3
2	Terentang	<div><div></div></div> 145	<div><div></div></div> 86	<div><div></div></div> 47	<div><div></div></div> 2	0	10
3	Kubu	<div><div></div></div> 221	<div><div></div></div> 123	<div><div></div></div> 65	<div><div></div></div> 12	0	21
4	Teluk Pakedai	<div><div></div></div> 103	<div><div></div></div> 53	<div><div></div></div> 34	<div><div></div></div> 9	0	7
5	Sungai Kakap	<div><div></div></div> 350	<div><div></div></div> 225	<div><div></div></div> 97	<div><div></div></div> 18	0	10
6	Rasau Jaya	<div><div></div></div> 128	<div><div></div></div> 47	<div><div></div></div> 49	<div><div></div></div> 21	<div><div></div></div> 5	6
7	Sungai Raya	<div><div></div></div> 342	<div><div></div></div> 220	<div><div></div></div> 100	<div><div></div></div> 14	<div><div></div></div> 1	7
8	Sungai Ambawang	<div><div></div></div> 319	<div><div></div></div> 283	<div><div></div></div> 27	<div><div></div></div> 1	0	8
9	Kuala Mandor B	<div><div></div></div> 76	<div><div></div></div> 45	<div><div></div></div> 25	<div><div></div></div> 2	0	4
	Jumlah	1884	1230	478	94	6	76

Sumber : Dinas Pangan dan Pertanian (2023)

Data diatas menunjukan bahwa sebaran jumlah kelompok tani di Kabupaten Kubu Raya sangat beragam. Kecamatan Sungai Kakap memiliki jumlah kelompok tani paling banyak sebesar 350 poktan, serta kecamatan Sungai Raya, dan Sungai Ambawang yang memiliki jumlah poktan diatas 300 kelompok. Kelas kelompok tani menunjukan bahwa angka pemula masih tergolong tinggi, dari 1884 poktan sebesar 65% tergolong kelompok pemula, 25% lanjut, 5% Madya dan 0,32% Utama.

Jumlah kelembagaan petani di tingkat Kecamatan terdiri dari penyuluh PNS, penyuluh swadaya, gapoktan, poktan dan kelembagaan ekonomi petani. Rasio Kelompok Tani dan Penyuluh lapangan di Kabupaten Kubu Raya adalah 15 dengan jumlah poktan 1884 dan jumlah penyuluh 127 yang tersebar di 9 kecamatan dengan sebaran sebagai berikut.

Tabel 5. Data Rasio Kelompok Tani dan Penyuluh Lapangan

No	Kecamatan	Jumlah PPL	Penyuluh Swadaya	Jumlah Poktan	Jumlah Gapoktan	Jumlah KEP	Ratio Poktan dan PPL
1	Batu Ampar	6	9	200	15	-	 13
2	Terentang	6	4	145	13	1	 15
3	Kubu	7	7	221	18	1	 16
4	Teluk Pakedai	5	5	103	15	-	 10
5	Sungai Kakap	10	14	349	30	-	 15
6	Rasau Jaya	5	13	129	6	-	 7
7	Sungai Raya	10	7	341	29	3	 20
8	Sungai Ambawang	6	4	319	34	-	 32
9	Kuala Mandor B	5	4	77	5	5	 9
	Jumlah	60	67	1884	165	10	15

Sumber : Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian (2023)

2.2.3. Sumber Daya Lahan

Luas lahan pertanian di Kabupaten Kubu Raya berdasarkan data Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Kubu Raya seluas 45.237 hektar. Lahan pertanian terbagi menjadi lima jenis yaitu kebun (lahan hortikultura tahunan); ladang (tanaman padi tahunan); sawah irigasi (lahan sawah tercakup daerah irigasi); sawah pasang surut; dan tegal (hortikultura semusim dan jagung). Luas lahan pertanian dapat dilihat pada tabel 6 berikut.

Tabel 6. Luas Lahan Pertanian Menurut Kecamatan

No	Kecamatan/ Desa	Kebun	Ladang	Sawah Irigasi	Sawah Pasang Surut	Tegal	Total
1	Batu Ampar			550	5.163	192	5.905
2	Terentang	36			1.146	53	1.235
3	Kubu			313	4.917	549	5.780
4	Teluk Pakedai			26	2.227	174	2.427
5	Sungai Kakap	8.168			8.265	3.027	19.461
6	Rasau Jaya	15			928	1.072	2.015
7	Sungai Raya	156			4.057	1.792	6.005

8	Sungai Ambawang	98	161		460	647	1.366
9	Kuala Mandor B	28	13		778	225	1.043
	Total	8.501	174	890	27.941	7.732	45.237

Sumber: Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian (2020)

Tabel 7. Lahan Pertanian di Kecamatan Batu Ampar

Desa	Kebun	Ladang	Sawah Irigasi	Sawah Pasang Surut	Tegal	Total
Batu Ampar			550	327	192	1.070
Ambarawa				532		532
Medan Mas				44		44
Muara Tiga				515		515
Nipah Panjang				625		625
Sumber Agung				683		683
Sungai Besar				254		254
Sungai Jawi				247		247
Sungai Kerawang				1.176		1.176
Tanjung Harapan				276		276
Tasik Malaya				45		45
Teluk Nibung				437		437
Total			550	5.163	192	5.905

Tabel 8. Lahan Pertanian di Kecamatan Terentang

Desa	Kebun	Ladang	Sawah Irigasi	Sawah Pasang Surut	Tegal	Total
Betuah				2		2
Permata				189		189
Sungai Radak Dua	33			117		149

Sungai Radak Satu				259	1	261
Teluk Bayur				150		150
Teluk Empening	3			353	37	393
Terentang Hilir				77	15	92
Total	36			1.146	53	1.235

Tabel 9. Lahan Pertanian di Kecamatan Kubu

Desa	Kebun	Ladang	Sawah Irigasi	Sawah Pasang Surut	Tegal	Total
Kubu				395		395
Air Putih				174		174
Ambawang			195	640		836
Dabung				73		73
Jangkang Dua				108	6	114
Jangkang Satu				83	56	139
Kampung Baru				709	8	717
Mengkalang				305	111	415
Mengkalang Jambu				94	205	299
Olak Olak Kubu				549	54	603
Pelita Jaya				64		64
Persiapan Bemban Timur			71	550		621
Pinang Dalam				119	18	137
Pinang Luar				126	2	128

Seruat Dua				128	84	212
Seruat Tiga				22		22
Sungai Bemban			47	118	6	171
Sungai Selamat				93		93
Sungai Terus				182		182
Teluk Nangka				385		385
Total			313	4.917	549	5.780

Tabel 10. Lahan Pertanian di Kecamatan Teluk Pakedai

Desa	Kebun	Ladang	Sawah Irigasi	Sawah Pasang Surut	Tegal	Total
Arus Deras				24	2	26
Kuala Karang				211		211
Madura				91		91
Pasir Putih				356	5	361
Selat Remis			26	142		168
Seruat Satu				62		62
Sungai Deras				168		168
Sungai Nibung				59		59
Sungai Nipah				104		104
Tanjung Bunga				233		233
Teluk Gelam				141		141
Teluk Pakedai 2				55		55
Teluk Pakedai Hulu				289	167	456
Teluk Pakedai 1				291		291
Total			26	2.227	174	2.427

Tabel 11. Lahan Pertanian di Kecamatan Sungai Kakap

Desa	Kebun	Ladang	Sawah Irigasi	Sawah Pasang Surut	Tegal	Total
Sungai Kakap	3			427	56	487
Jeruju Besar				181		181
Kalimas	1.099			540	168	1.807
Pal Sembilan	1.378			390	110	1.878
Persiapan Parit Keladi				494	84	578
PersRengas Kapuas	108			166	29	304
Punggur Besar	1.838			911	613	3.362
Punggur Kapuas				271	296	567
Punggur Kecil	3.603			478	1.285	5.365
Sepuk Laut				66		66
Sungai Belidak	89			532	43	665
Sungai Itik				424		424
Sungai Kupah				100		100
Sungai Rengas	49			962	245	1.256
Tanjung Saleh				2.323	98	2.420
Total	8.168			8.265	3.027	19.461



Tabel 12. Lahan Pertanian di Kecamatan Rasau Jaya

Desa	Kebun	Ladang	Sawah Irigasi	Sawah Pasang Surut	Tegal	Total
Bintang Mas				110	57	167
Pematang Tujuh				8	65	73
Rasau Jaya Dua				95	295	390
Rasau Jaya Satu				52	473	524
Rasau Jaya Tiga	10			310	78	398
Rasau Jaya Umum	5			353	105	463
Total	15			928	1.072	2.015

Tabel 13. Lahan Pertanian di Kecamatan Sungai Raya

Desa	Kebun	Ladang	Sawah Irigasi	Sawah Pasang Surut	Tegal	Total
Sungai Raya				23		23
Arang Limbung				164	47	211
Kali Bandung				129		129
Kapur				52	27	79
Kuala Dua	156			651	202	1.009
Limbung				165	212	377
Madu Sari				93	297	390
Mekar Baru				68	28	96

Mekar Sari				459	284	742
Parit Baru				271	5	276
Persiapan Permata Jaya				349	6	355
Persiapan Sukulanting				425	4	429
Sungai Ambangah				252	28	279
Sungai Asam				91	229	319
Sungai Bulan				521	223	744
Sungai Raya Dalam				96	28	124
Tebang Kacang				212	170	382
Teluk Kapuas				39	2	41
Total	156			4.057	1.792	6.005

Tabel 14. Lahan Pertanian di Kecamatan Sungai Raya

Desa	Kebun	Ladang	Sawah Irigasi	Sawah Pasang Surut	Tegal	Total
Ampera Raya				9		9
Bengkarek		13		14		27
Durian				41	39	80
Jawa Tengah				31	4	35
Korek				1	18	19
Lingga		42		47	62	151
Mega Timur	98			20	10	127
Pancaroba		105		3		108
Pasak				128	1	129
Pasak Piang				19	0	19
Persiapan Kuala Bakung				44		44
Persiapan Simpang Raya					319	319
Simpang Kanan					25	25
Sungai Ambawang Kuala				92	5	97
Sungai Malaya					163	163
Teluk Bakung				11		11
Total	98	161		460	647	1.366

Tabel 15. Lahan Pertanian di Kecamatan Kuala Mandor B

Desa	Kebun	Ladang	Sawah Irigasi	Sawah Pasang Surut	Tegal	Total
Kuala Mandor B	2			131	6	140
Kuala Mandor A		13		200	4	217
Kubu Padi				76	12	88
Padi Jaya				6	9	16
Retok				192	93	285
Sungai Enau	25			173	100	299
Total	28	13		778	225	1.043

**2.3. Kinerja Pelayanan Dinas Pertanian**

Sesuai Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 mendefenisikan kinerja merupakan capaian keluaran/hasil/dampak dari kegiatan/program/sasaran sehubungan dengan penggunaan sumber daya pembangunan. Dalam perspektif Renstra-PD, kinerja dapat digambarkan sebagai tingkat pencapaian pelaksanaan suatu program/ kegiatan dalam mewujudkan tujuan dan sasaran organisasi yang tertuang dalam rencana strategis.

**2.3.1. Capaian Kinerja Pelayanan Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kubu Raya**

capaian kinerja Dinas Ketahanan dan Pertanian dapat dilihat dari hasil capaian tujuan dan sasaran pada renstra periode sebelumnya. Terdapat dua indikator utama yaitu nilai SAKIP PD dan angka PDRB Sektor pertanian tang diuraikan sebagai berikut;

Tabel 16. Capaian Kinerja

No.	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun					Realisasi Capaian Tahun					Rasio Capaian pada Tahun				
		2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	Nilai SAKIP SKPD	58	59	60	62	64	74,07	63,63	67	66,65	-	128%	108%	112%	108%	
2	PDRB Sektor Pertanian	1.270.000	1.280.000	1.290.000	1.300.000	1.310.000	1.171.107,1	1.241.721,2	1.279.505,0	1.263.311,0	1.260.443,6	92%	97%	99%	97%	96%

Dari tabel tersebut dapat diketahui bahwa indikator kinerja pada urusan penunjang pemerintahan yaitu nilai SAKIP SKPD memiliki capaian diatas 100% mulai dari Tahun 2019-2022. Sedangkan pada indikator kinerja pada urusan pangan dan pertanian terjadi fluktuasi nilai PDRB sektor pertanian dengan capaian diatas 90% setiap tahunnya mulai dari Tahun 2019 – 2023.

Tabel 17. Realisasi Anggaran Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian

Uraian	Anggaran Pada Tahun Ke-					Realisasi Anggaran Pada Tahun Ke-					Rasio Antara Realisasi dan Anggaran Tahun Ke-					Rata-Rata Pertumbuhan	
	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	Anggaran	Realisasi
	2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023		
<b>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>	<b>836.378.840</b>	<b>569.185.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>774.887.325</b>	<b>514.623.148</b>				<b>92,65 %</b>	<b>90,41 %</b>				- 100,00 %	- 100,00 %
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	81.600.000	123.400.000				53.430.659	90.491.698				65,48 %	73,33 %				- 100,00 %	- 100,00 %
Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	18.550.000	25.800.000				12.695.400	12.706.500				68,44 %	49,25 %				- 100,00 %	- 100,00 %
Penyediaan jasa administrasi keuangan	5.748.000	3.535.500				5.136.000	3.193.500				89,35 %	90,33 %				- 100,00 %	- 100,00 %
Penyediaan jasa kebersihan kantor	59.600.000	59.680.000				59.599.500	59.599.500				100,00 %	99,87 %				- 100,00 %	- 100,00 %
Penyediaan alat tulis kantor	44.182.750	45.000.000				44.182.750	44.840.500				100,00 %	99,65 %				- 100,00 %	- 100,00 %
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	35.396.550	30.030.000				35.396.550	30.028.950				100,00 %	100,00 %				- 100,00 %	- 100,00 %
Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	8.000.000	11.514.500				8.000.000	11.514.500				100,00 %	100,00 %				- 100,00 %	- 100,00 %
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	14.000.000	14.000.000				13.972.000	13.968.000				99,80 %	99,77 %				- 100,00 %	- 100,00 %
Penyediaan makanan dan minuman	25.000.000	11.700.000				24.960.000	5.980.000				99,84 %	51,11 %				- 100,00 %	- 100,00 %
Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke luar Daerah	334.575.290	154.525.000				318.004.466	154.525.000				95,05 %	100,00 %				- 100,00 %	- 100,00 %
Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah	201.726.250	90.000.000				191.510.000	87.775.000				94,94 %	97,53 %				- 100,00 %	- 100,00 %
Penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP)	8.000.000					8.000.000					100,00 %	#DIV/0!				- 100,00 %	- 100,00 %
<b>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>	<b>675.200.000</b>	<b>729.010.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>668.425.550</b>	<b>683.505.250</b>				<b>99,00 %</b>	<b>93,76 %</b>				- 100,00 %	- 100,00 %
Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	117.000.000	392.410.200				111.911.000	362.650.500				95,65 %	92,42 %				- 100,00 %	- 100,00 %

Penyediaan Sewa Gedung/ Kantor/ Tempat	280.000.000	75.000.000				280.000.000	75.000.000					100,00 %	100,00 %				- 100,00 %	- 100,00 %
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	60.000.000	60.000.000				59.915.350	51.505.350					99,86 %	85,84 %				- 100,00 %	- 100,00 %
Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	11.000.000	11.000.000				10.978.200	10.957.400					99,80 %	99,61 %				- 100,00 %	- 100,00 %
Pemeliharaan Rutin/Berkala Komputer	20.000.000	25.000.000				19.981.000	19.949.000					99,91 %	79,80 %				- 100,00 %	- 100,00 %
Program peningkatan Disiplin Aparatur	93.600.000	93.600.000				92.820.000	92.820.000					99,17 %	99,17 %				- 100,00 %	- 100,00 %
Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	93.600.000	72.000.000				92.820.000	70.623.000					99,17 %	98,09 %				- 100,00 %	- 100,00 %
<b>Program peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur</b>	<b>21.350.000</b>	<b>80.000.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>21.265.639</b>	<b>69.000.000</b>					<b>99,60 %</b>	<b>86,25 %</b>				- 100,00 %	- 100,00 %
Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	4.500.000	80.000.000				4.500.000	69.000.000					100,00 %	86,25 %				- 100,00 %	- 100,00 %
Pendidikan dan Pelatihan Teknis Fungsional Bagi PNS Daerah	16.850.000	0				16.765.639	0					99,50 %	#DIV/0!				- 100,00 %	- 100,00 %
<b>Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan</b>	<b>32.333.000</b>	<b>55.920.300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>30.197.000</b>	<b>52.640.300</b>					<b>93,39 %</b>	<b>94,13 %</b>				- 100,00 %	- 100,00 %
Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	5.255.200	6.700.450				5.255.200	6.364.450					100,00 %	94,99 %				- 100,00 %	- 100,00 %
Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran	2.850.700	6.170.000				2.850.700	6.170.000					100,00 %	100,00 %				- 100,00 %	- 100,00 %
penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun	7.298.800	11.984.450				7.298.800	11.984.450					100,00 %	100,00 %				- 100,00 %	- 100,00 %
Penyusunan Rencana Kerja, RKA, DPA dan DPPA	10.597.000	18.236.950				8.461.000	17.276.950					79,84 %	94,74 %				- 100,00 %	- 100,00 %
Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) dan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) SKPD	6.331.300	12.828.450				6.331.300	10.844.450					100,00 %	84,53 %				- 100,00 %	- 100,00 %
<b>Program peningkatan pemasaran hasil produksi pertanian/perkebunan</b>	<b>337.987.250</b>	<b>108.954.650</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>335.223.218</b>	<b>108.954.650</b>					<b>99,18 %</b>	<b>100,00 %</b>				- 100,00 %	- 100,00 %
Promosi atas hasil produksi pertanian/perkebunan unggulan daerah	337.987.250	108.954.650				335.223.218	108.954.650					99,18 %	100,00 %				- 100,00 %	- 100,00 %

<b>Program sistem informasi/database pertanian</b>	<b>129.531.700</b>	<b>223.171.450</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>129.531.700</b>	<b>217.887.200</b>					<b>100,00%</b>	<b>97,63%</b>				<b>-100,00%</b>	<b>-100,00%</b>
Penyusunan sistem informasi/database pertanian	119.531.700	214.548.450				119.531.700	209.264.200					100,00%	97,54%				<b>-100,00%</b>	<b>-100,00%</b>
Penyusunan Buku Profil Dinas Pertanian Kabupaten Kubu Raya	10.000.000	8.623.000				10.000.000	8.623.000					100,00%	100,00%				<b>-100,00%</b>	<b>-100,00%</b>
<b>Program Pembinaan dan Pengembangan kelembagaan, Ketatalaksanaan dan Aparatur Pemerintah daerah</b>	<b>38.075.000</b>	<b>74.112.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>36.735.000</b>	<b>67.087.000</b>					<b>96,48%</b>	<b>90,52%</b>				<b>-100,00%</b>	<b>-100,00%</b>
Penyusunan Database E-Formasi	5.775.000	14.272.000				5.775.000	7.247.000					100,00%	50,78%				<b>-100,00%</b>	<b>-100,00%</b>
Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	32.300.000	59.840.000				30.960.000	59.840.000					95,85%	100,00%				<b>-100,00%</b>	<b>-100,00%</b>
<b>Program Perencanaan Pembangunan Daerah</b>	<b>8.855.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8.855.000</b>	<b>0</b>					<b>100,00%</b>	<b>#DIV/0!</b>				<b>-100,00%</b>	<b>-100,00%</b>
Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) SKPD	8.855.000					8.855.000						100,00%	#DIV/0!				<b>-100,00%</b>	<b>-100,00%</b>
<b>Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah</b>	<b>54.099.100</b>	<b>67.007.100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>53.650.411</b>	<b>66.647.100</b>					<b>99,17%</b>	<b>99,46%</b>				<b>-100,00%</b>	<b>-100,00%</b>
Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Keuangan SKPD	10.050.000	<b>67.007.100</b>				9.601.311	<b>66.647.100</b>					95,54%	99,46%				<b>-100,00%</b>	<b>-100,00%</b>
Fasilitasi Penataan Aset Pada SKPD	44.049.100					44.049.100						100,00%	#DIV/0!				<b>-100,00%</b>	<b>-100,00%</b>
<b>Program Peningkatan Ketahanan Pangan (pertanian/perkebunan)</b>	<b>2.237.733.300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.091.558.300</b>	<b>0</b>					<b>93,47%</b>	<b>#DIV/0!</b>				<b>-100,00%</b>	<b>-100,00%</b>
Penanganan Pasca Panen dan Pengolahan Hasil Pertanian Tanaman Pangan	994.868.300					944.313.300						94,92%	#DIV/0!				<b>-100,00%</b>	<b>-100,00%</b>
Pengembangan perbenihan/pembibitan Tanaman Pangan	1.242.865.000					1.147.245.000						92,31%	#DIV/0!				<b>-100,00%</b>	<b>-100,00%</b>
<b>Program peningkatan produksi pertanian/perkebunan</b>	<b>1.349.080.000</b>	<b>1.100.653.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>920.244.000</b>	<b>944.672.650</b>					<b>68,21%</b>	<b>85,83%</b>				<b>-100,00%</b>	<b>-100,00%</b>
Penguatan Perlindungan Tanaman Pangan dari Gangguan OPT dan DFI	1.349.080.000	1.100.653.000				920.244.000	944.672.650					68,21%	85,83%				<b>-100,00%</b>	<b>-100,00%</b>
<b>Program Peningkatan Ketahanan Pangan (pertanian/perkebunan)</b>	<b>622.440.210</b>	<b>1.461.134.300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>619.836.989</b>	<b>1.431.667.400</b>					<b>99,58%</b>	<b>97,98%</b>				<b>-100,00%</b>	<b>-100,00%</b>



Pemanfaatan pekarangan untuk pengembangan pangan	80.943.500	80.943.500				80.924.750	80.924.750				99,98 %	99,98 %				- 100,00 %	- 100,00 %
Pengembangan pertanian pada lahan kering	253.001.260	621.620.800				252.639.350	601.085.700				99,86 %	96,70 %				- 100,00 %	- 100,00 %
Pengembangan perbenihan/pembibitan Hortikultura	288.495.450	758.570.000				286.272.889	749.656.950				99,23 %	98,83 %				- 100,00 %	- 100,00 %
<b>Program peningkatan pemasaran hasil produksi pertanian/perkebunan</b>	<b>14.556.500</b>	<b>26.400.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>14.556.500</b>	<b>25.965.000</b>				<b>100,00 %</b>	<b>98,35 %</b>				- 100,00 %	- 100,00 %
Peningkatan kapasitas kelembagaan pengembangan mutu P2HP	14.556.500	26.400.000				14.556.500	25.965.000				100,00 %	98,35 %				- 100,00 %	- 100,00 %
<b>Program peningkatan produksi pertanian/perkebunan</b>	<b>608.327.000</b>	<b>554.367.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>605.158.769</b>	<b>551.736.889</b>				<b>99,48 %</b>	<b>99,53 %</b>				- 100,00 %	- 100,00 %
Penguatan dan Pemberdayaan Brigade Proteksi Tanaman	608.327.000	554.367.800				605.158.769	551.736.889				99,48 %	99,53 %				- 100,00 %	- 100,00 %
<b>Program Peningkatan Kesejahteraan Petani</b>	<b>1.040.054.900</b>	<b>647.742.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.032.134.850</b>	<b>583.001.350</b>				<b>99,24 %</b>	<b>90,01 %</b>				- 100,00 %	- 100,00 %
Pelaksanaan Program Penyuluhan (IPDMIP)	574.717.850	437.892.800				568.957.850	380.351.350				99,00 %	86,86 %				- 100,00 %	- 100,00 %
Perekrutan dan Pelatihan Staf Lapangan (IPDMIP)	172.555.050	209.850.000				170.540.650	202.650.000				98,83 %	96,57 %				- 100,00 %	- 100,00 %
Rembug dan Mimbar Sarasehan KTNA	208.057.000	0				207.927.000	0				99,94 %	#DIV/0!				- 100,00 %	- 100,00 %
Pendampingan Proyek Pengembangan dan manajemen Irigasi Partisipatif Terintegrasi (IPDMIP)	84.725.000	0				84.709.350	0				99,98 %	#DIV/0!				- 100,00 %	- 100,00 %
<b>Program Pemberdayaan Penyuluh Pertanian/Perkebunan Lapangan</b>	<b>1.564.914.050</b>	<b>1.629.989.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.541.604.444</b>	<b>1.224.760.154</b>				<b>98,51 %</b>	<b>75,14 %</b>				- 100,00 %	- 100,00 %
Peningkatan Kapasitas Tenaga Penyuluh Pertanian/Perkebunan	150.554.950	335.997.850				150.214.950	334.925.850				99,77 %	99,68 %				- 100,00 %	- 100,00 %
Supervisi/Penilaian Kinerja Penyuluh	145.000.000	117.128.000				145.000.000	117.094.000				100,00 %	99,97 %				- 100,00 %	- 100,00 %
Peningkatan Kinerja Petugas Penyuluh Lapangan	245.750.800	765.460.800				244.705.800	404.975.800				99,57 %	52,91 %				- 100,00 %	- 100,00 %
Operasional BPP	236.108.300	381.402.950				234.890.300	367.764.504				99,48 %	96,42 %				- 100,00 %	- 100,00 %

Penyediaan Sarana dan Prasarana Penyuluhan	787.500.000	30.000.000				766.793.394	0				97,37 %	0,00%				-100,00 %	#DIV/0!	
Program peningkatan pemasaran hasil produksi pertanian/perkebunan	3.509.999.800	886.801.776	0	0	0	3.319.879.507	872.453.045				94,58 %	98,38 %				-100,00 %	-100,00%	
Pengembangan kawasan agribisnis pertanian	3.509.999.800	886.801.776				3.319.879.507	872.453.045				94,58 %	98,38 %				-100,00 %	-100,00%	
Program peningkatan produksi pertanian/perkebunan	178.115.200	823.222.100	0	0	0	171.728.700	750.812.292				96,41 %	91,20 %				-100,00 %	-100,00%	
Pengawasan Peredaran dan Penggunaan Pupuk Pestisida	178.115.200	823.222.100				171.728.700	750.812.292				96,41 %	91,20 %				-100,00 %	-100,00%	
Program penyediaan dan pengembangan prasarana dan sarana pertanian	3.116.882.800	2.129.419.650	0	0	0	2.801.079.665	1.991.597.450				89,87 %	93,53 %				-100,00 %	-100,00%	
Peningkatan sarana dan prasarana pertanian tanaman pangan	2.714.733.000	1.705.998.400				2.439.488.665	1.580.238.400				89,86 %	92,63 %				-100,00 %	-100,00%	
Peningkatan Pemberdayaan Kelembagaan dan Pengelolaan Alsintan	402.149.800	423.421.250				361.591.000	411.359.050				89,91 %	97,15 %				-100,00 %	-100,00%	
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					13.952.475.935	13.760.062.827	13.444.123.044		#####	13.158.243.323	12.022.341.535			99,55 %	95,63 %	89,42 %	-1,84%	-6,96%
Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah					208.853.587	196.952.824	231.636.189		207.383.163	195.830.720	211.470.200			99,30 %	99,43 %	91,29 %	5,31%	0,98%
Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah					122.997.801	182.634.860	165.916.189		122.493.510	181.799.860	153.530.300			99,59 %	99,54 %	92,53 %	16,14 %	11,95 %
Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD					10.998.866	6.373.994			10.788.788	6.151.890				98,09 %	96,52 %		-100,00 %	-100,00%
Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah					74.856.920	7.943.970	65.720.000		74.100.865	7.878.970	57.939.900			98,99 %	99,18 %	88,16 %	-6,30%	11,57 %
Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah					12.779.646.922	13.029.926.695	12.487.300.905		#####	12.462.315.825	11.171.559.154			99,97 %	95,64 %	89,46 %	-1,15%	-6,49%
Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN					12.640.760.157	13.029.926.695	12.485.300.905		12.640.760.157	12.462.315.825	11.151.944.454			100,00 %	95,64 %	89,32 %	-0,62%	-6,07%
Sub Kegiatan Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD					115.445.925				111.982.547					97,00 %	#DIV/0!	#DIV/0!	-100,00 %	-100,00%

Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD			13.441.257		2.000.000			13.158.991		19.614.700			97,90 %	#DIV/0!	980,74 %	-100,00 %	-100,00 %
Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD			9.999.583					9.618.599					96,19 %	#DIV/0!	#DIV/0!	-100,00 %	-100,00 %
<b>Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>			<b>121.926.079</b>	<b>34.737.860</b>	<b>187.000.000</b>			<b>121.525.530</b>	<b>30.994.810</b>	<b>166.831.008</b>			99,67 %	89,22 %	89,21 %	23,84 %	17,17 %
Sub Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi			45.826.914	23.557.000	155.000.000			45.753.591	19.943.950	135.093.748			99,84 %	84,66 %	87,16 %	83,91 %	71,83 %
Sub Kegiatan Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan			76.099.165	11.180.860	32.000.000			75.771.939	11.050.860	31.737.260			99,57 %	98,84 %	99,18 %	-35,15 %	-35,28 %
<b>Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>			<b>188.689.510</b>	<b>125.558.463</b>	<b>101.725.752</b>			<b>175.889.686</b>	<b>113.220.443</b>	<b>91.740.241</b>			93,22 %	90,17 %	90,18 %	-26,58 %	-27,78 %
Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor			4.982.060					4.957.150					99,50 %	#DIV/0!	#DIV/0!	-100,00 %	-100,00 %
Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor			31.428.957	8.856.100	9.402.634			31.356.670	8.856.100	9.224.300			99,77 %	100,00 %	98,10 %	-45,30 %	-45,76 %
Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan			15.381.493	10.554.363	3.814.118			15.336.887	10.554.060	3.780.780			99,71 %	100,00 %	99,13 %	-50,20 %	-50,35 %
Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan			15.999.000	15.999.000	4.080.000			15.999.000	15.999.000	2.720.000			100,00 %	100,00 %	66,67 %	-49,50 %	-58,77 %
Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			120.898.000	90.149.000	84.429.000			108.239.979	77.811.283	76.015.161			89,53 %	86,31 %	90,03 %	-16,43 %	-16,20 %
<b>Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>			<b>144.644.656</b>	-	-			<b>142.204.896</b>	-	-			98,31 %	#DIV/0!	#DIV/0!	-100,00 %	-100,00 %
Sub Kegiatan Pengadaan Mebel			78.651.956					78.172.179					99,39 %	#DIV/0!	#DIV/0!	-100,00 %	-100,00 %
Sub Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			65.992.700					64.032.717					97,03 %	#DIV/0!	#DIV/0!	-100,00 %	-100,00 %
<b>Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>			<b>434.719.181</b>	<b>312.250.985</b>	<b>351.309.585</b>			<b>404.609.213</b>	<b>306.407.275</b>	<b>316.953.532</b>			93,07 %	98,13 %	90,22 %	-10,10 %	-11,49 %
Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			87.300.000	87.300.000	110.040.000			79.800.930	82.088.705	98.559.932			91,41 %	94,03 %	89,57 %	-12,27 %	-11,13 %

Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor			80.000.000		241.269.585			66.000.000		218.393.600			82,50 %	#DIV/ 0!	90,52 %	- 100,00 %	- 100,00 %
Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			267.419.181	224.950.985				258.808.283	224.318.570				96,78 %	99,72 %	#DIV/ 0!	- 100,00 %	- 100,00 %
<b>Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>			<b>73.996.000</b>	<b>60.636.000</b>	<b>85.150.613</b>			<b>62.615.415</b>	<b>49.474.250</b>	<b>63.787.400</b>			84,62 %	81,59 %	74,91 %	7,27%	0,93%
Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan			73.996.000	60.636.000	85.150.613			62.615.415	49.474.250	63.787.400			84,62 %	81,59 %	74,91 %	7,27%	0,93%
Sub Kegiatan Pemeliharaan/Reha bilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya													#DIV/ 0!	#DIV/ 0!	#DIV/ 0!	#DIV/0 !	#DIV/ 0!
<b>PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN DAN KEMANDIRIAN PANGAN</b>			<b>13.971.164</b>	<b>3.000.000.000</b>	<b>50.851.543</b>			<b>13.965.576</b>	<b>2.954.001.000</b>	<b>48.174.303</b>			99,96 %	98,47 %	94,74 %	90,78 %	85,73 %
<b>Kegiatan Penyediaan Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan Lainnya</b>			<b>13.971.164</b>	<b>3.000.000.000</b>	<b>50.851.543</b>			<b>13.965.576</b>	<b>2.954.001.000</b>	<b>48.174.303</b>			99,96 %	98,47 %	94,74 %	90,78 %	85,73 %
Sub Kegiatan Penyediaan Infrastruktur Lumbung Pangan			13.971.164	3.000.000.000	50.851.543			13.965.576	2.954.001.000	48.174.303			99,96 %	98,47 %	94,74 %	90,78 %	85,73 %
<b>PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT</b>			<b>613.397.532</b>	<b>429.366.466</b>	<b>551.509.078</b>			<b>585.813.108</b>	<b>424.886.031</b>	<b>546.385.607</b>			95,50 %	98,96 %	99,07 %	-5,18%	- 3,42%
<b>Kegiatan Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam Rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan</b>			<b>392.059.365</b>	<b>201.995.343</b>	<b>488.577.864</b>			<b>366.090.710</b>	<b>201.015.343</b>	<b>484.755.839</b>			93,38 %	99,51 %	99,22 %	11,63 %	15,07 %
Sub Kegiatan Penyediaan Informasi Harga Pangan dan Neraca Bahan Makanan			57.164.861	31.598.633	442.277.566			55.827.203	31.598.633	440.243.500			97,66 %	100,00 %	99,54 %	178,15 %	180,82 %
Sub Kegiatan Penyediaan Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal			93.930.405					81.043.153					86,28 %	#DIV/ 0!	#DIV/ 0!	- 100,00 %	- 100,00 %
Sub Kegiatan Pemantauan Stok, Pasokan dan Harga Pangan			53.031.436					53.026.133					99,99 %	#DIV/ 0!	#DIV/ 0!	- 100,00 %	- 100,00 %

Sub Kegiatan Pengembangan Kelembagaan dan Jaringan Distribusi Pangan			46.391.004	33.598.000	46.300.298			46.386.365	33.598.000	44.512.339			99,99 %	100,0 0%	96,14 %	-0,10%	- 2,04%
Sub Kegiatan Pengembangan Usaha Pangan Masyarakat dan Toko Tani Indonesia			141.541.659	136.798.710	-			129.807.855	135.818.710	-			91,71 %	99,28 %	#DIV/0!	- 100,00 %	- 100,0 0%
<b>Kegiatan Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi</b>			<b>221.338.167</b>	<b>227.371.123</b>	<b>62.931.214</b>			<b>219.722.398</b>	<b>223.870.688</b>	<b>61.629.768</b>			99,27 %	98,46 %	97,93 %	- 46,68 %	- 47,04 %
Sub Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal			221.338.167	227.371.123	62.931.214			219.722.398	223.870.688	61.629.768			99,27 %	98,46 %	97,93 %	- 46,68 %	- 47,04 %
<b>PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN</b>			<b>207.095.535</b>	<b>84.698.410</b>	<b>168.159.974</b>			<b>199.009.535</b>	<b>84.698.410</b>	<b>161.720.052</b>			96,10 %	100,0 0%	96,17 %	-9,89%	- 9,85%
<b>Kegiatan Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan Kecamatan</b>			<b>50.277.272</b>	<b>35.898.780</b>	<b>59.167.296</b>			<b>49.673.945</b>	<b>35.898.780</b>	<b>54.186.416</b>			98,80 %	100,0 0%	91,58 %	8,48%	4,44%
Sub Kegiatan Penyusunan, Pemutakhiran dan Analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan			50.277.272	35.898.780	59.167.296			49.673.945	35.898.780	54.186.416			98,80 %	100,0 0%	91,58 %	8,48%	4,44%
<b>Kegiatan Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten/Kota</b>			<b>156.818.263</b>	<b>48.799.630</b>	<b>108.992.678</b>			<b>149.335.591</b>	<b>48.799.630</b>	<b>107.533.636</b>			95,23 %	100,0 0%	98,66 %	- 16,63 %	- 15,14 %
Sub Keg Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan Kabupaten/ Kota			21.016.428	9.999.740	16.107.566			20.663.352	9.999.740	16.055.500			98,32 %	100,0 0%	99,68 %	- 12,45 %	- 11,85 %
Sub Keg Pelaksanaan Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan pada Kerawanan Pangan yang Mencakup dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota			135.801.835	38.799.890	92.885.112			128.672.239	38.799.890	91.478.136			94,75 %	100,0 0%	98,49 %	- 17,30 %	- 15,68 %
<b>PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN</b>			<b>121.109.914</b>	<b>14.999.961</b>	<b>32.928.560</b>			<b>120.213.701</b>	<b>14.999.961</b>	<b>31.128.560</b>			99,26 %	100,0 0%	94,53 %	- 47,86 %	- 49,11 %
<b>Kegiatan Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota</b>			<b>121.109.914</b>	<b>14.999.961</b>	<b>32.928.560</b>			<b>120.213.701</b>	<b>14.999.961</b>	<b>31.128.560</b>			99,26 %	100,0 0%	94,53 %	- 47,86 %	- 49,11 %
Sub Kegiatan Rekomendasi Keamanan Pangan Segar Asal Daerah Kabupaten/ Kota			121.109.914	14.999.961	32.928.560			120.213.701	14.999.961	31.128.560			99,26 %	100,0 0%	94,53 %	- 47,86 %	- 49,11 %

<b>PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN</b>				1.483.749.032	1.932.457.906	1.446.936.082			1.482.061.900	1.837.338.273	1.384.986.286			99,89 %	95,08 %	95,72 %	-1,25%	- 3,33%
<b>Kegiatan Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian</b>				293.256.777	1.135.689.790	749.947.646			292.755.187	1.082.463.246	710.838.890			99,83 %	95,31 %	94,79 %	59,92 %	55,82 %
Sub Kegiatan Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai Dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi				197.672.925	253.764.790	218.211.435			197.534.554	237.205.990	188.838.180			99,93 %	93,47 %	86,54 %	5,07%	- 2,23%
Sub Kegiatan Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian				95.583.852	881.925.000	531.736.211			95.220.633	845.257.256	522.000.710			99,62 %	95,84 %	98,17 %	135,86 %	134,1 4%
<b>Kegiatan Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/ Kota</b>				1.190.492.255	796.768.116	696.988.436			1.189.306.713	754.875.027	674.147.396			99,90 %	94,74 %	96,72 %	- 23,48 %	- 24,71 %
Sub Kegiatan Penjaminan Kemurnian dan Kelestarian SDG Hewan/Tanaman				399.997.463	437.212.357	346.997.404			399.877.464	428.388.143	334.222.670			99,97 %	97,98 %	96,32 %	-6,86%	- 8,58%
Sub Kegiatan Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman				650.495.920	320.217.231	294.497.736			649.780.374	287.287.231	287.866.726			99,89 %	89,72 %	97,75 %	- 32,71 %	- 33,44 %
Sub Kegiatan Pemanfaatan SDG Hewan/Tanaman				139.998.872	39.338.528	55.493.296			139.648.875	39.199.653	52.058.000			99,75 %	99,65 %	93,81 %	37,04 %	38,94 %
<b>PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN</b>				4.358.925.419	1.698.686.870	4.240.534.857			4.343.367.953	904.043.313	4.047.225.633			99,64 %	53,22 %	95,44 %	-1,37%	- 3,47%
<b>Kegiatan Pengembangan Prasarana Pertanian</b>				493.945.791	81.149.833	121.190.000			484.735.072	81.148.380	75.631.000			98,14 %	100,0 0%	62,41 %	50,47 %	- 60,50 %
Sub Kegiatan Penyusunan Peta Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B				182.000.548					178.997.539					98,35 %	#DIV/ 0!	#DIV/ 0!	- 100,00 %	- 100,0 0%
Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya				311.945.243	81.149.833	121.190.000			305.737.533	81.148.380	75.631.000			98,01 %	100,0 0%	62,41 %	37,67 %	- 50,26 %
<b>Kegiatan Pembangunan Prasarana Pertanian</b>				3.864.979.628	1.617.537.037	4.119.344.857			3.858.632.881	822.894.933	3.971.594.633			99,84 %	50,87 %	96,41 %	3,24%	1,45%
Sub Kegiatan Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani				944.979.628	1.593.236.937	3.494.245.416			942.522.681	798.594.833	3.352.033.083			99,74 %	50,12 %	95,93 %	92,29 %	88,59 %
Sub Kegiatan Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan DAM Parit				540.250.000	9.900.100	50.035.000			536.360.200	9.900.100	48.599.919			99,28 %	100,0 0%	97,13 %	- 69,57 %	- 69,90 %

Sub Kegiatan Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Long Storage			2.379.750.000	14.400.000	575.064.441			2.379.750.000	14.400.000	570.961.631			100,00%	100,00%	99,29%	-50,84%	-51,02%
<b>PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN</b>			<b>1.014.944.876</b>	<b>656.848.570</b>	<b>1.046.995.632</b>			<b>894.680.860</b>	<b>651.411.170</b>	<b>1.014.901.600</b>			<b>88,15%</b>	<b>99,17%</b>	<b>96,93%</b>	<b>1,57%</b>	<b>6,51%</b>
<b>Kegiatan Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota</b>			<b>1.014.944.876</b>	<b>656.848.570</b>	<b>1.046.995.632</b>			<b>894.680.860</b>	<b>651.411.170</b>	<b>1.014.901.600</b>			<b>88,15%</b>	<b>99,17%</b>	<b>96,93%</b>	<b>1,57%</b>	<b>6,51%</b>
Sub Kegiatan Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan			539.975.480	348.648.580	672.396.813			462.812.984	344.465.580	660.888.600			85,71%	98,80%	98,29%	11,59%	19,50%
Sub Kegiatan Penanganan Dampak Perubahan Iklim (DPI) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan			329.232.634	258.800.000	296.000.000			287.617.629	258.645.600	288.715.760			87,36%	99,94%	97,54%	-5,18%	0,19%
Sub Kegiatan Pencegahan, Penanganan Kebakaran Lahan, dan Gangguan Usaha Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan			145.736.762	49.399.990	78.598.819			144.250.247	48.299.990	65.297.240			98,98%	97,77%	83,08%	-26,56%	-32,72%
<b>PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN</b>			<b>2.411.535.887</b>	<b>4.711.073.514</b>	<b>952.426.101</b>			<b>2.232.133.523</b>	<b>2.678.739.528</b>	<b>749.035.443</b>			<b>92,56%</b>	<b>56,86%</b>	<b>78,64%</b>	<b>-37,16%</b>	<b>-42,07%</b>
<b>Kegiatan Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian</b>			<b>2.411.535.887</b>	<b>4.711.073.514</b>	<b>952.426.101</b>			<b>2.232.133.523</b>	<b>2.678.739.528</b>	<b>749.035.443</b>			<b>92,56%</b>	<b>56,86%</b>	<b>78,64%</b>	<b>-37,16%</b>	<b>-42,07%</b>
Sub Kegiatan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa			946.735.249	2.095.740.078	294.828.525			907.919.104	291.554.211	271.587.200			95,90%	13,91%	92,12%	-44,20%	-45,31%
Sub Kegiatan Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa			99.769.830	24.538.146	174.626.007			-	22.227.347	169.321.063			0,00%	90,58%	96,96%	32,30%	#DIV/0!
Sub Kegiatan Penyediaan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian			941.920.456	1.818.115.290	482.971.569			902.077.221	1.594.509.670	308.127.180			95,77%	87,70%	63,80%	-28,39%	-41,56%
Sub Kegiatan Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya			423.110.352	772.680.000				422.137.198	770.448.300				99,77%	99,71%	#DIV/0!	-100,00%	-100,00%

## **2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan**

### **2.4.1. Penyebab Capaian Kinerja Tidak Terpenuhi**

#### **Dinas Ketahanan pangan dan Pertanian Kabupaten Kubu raya**

**Penyebab Pertama,** Alih fungsi lahan pertanian produktif. Dewasa ini, keberlanjutan sektor pertanian–tanaman pangan tengah dihadapkan pada ancaman serius, yakni luas lahan pertanian yang terus menyusut akibat konversi lahan pertanian produktif ke penggunaan non-pertanian yang terjadi secara masif. Kini lahan sawah lebih menguntungkan untuk dijadikan sebagai real estate, pabrik, atau infrastruktur untuk aktivitas industri lainnya daripada ditanami tanaman pangan.

**Penyebab Kedua,** Rendahnya produksi tanaman pangan. Produktivitas tanaman pangan di Kabupaten Kubu Raya khususnya padi masih sangat rendah. Produktivitas padi rata-rata 3,4 ton per hektar padahal di Pulau Jawa dapat mencapai 6 ton per hektar (hanya 50% dari produktivitas di Pulau Jawa).

**Penyebab Ketiga,** Rendahnya akses petani terhadap teknik budidaya. Dari sisi sumberdaya manusia, masih rendahnya kualitas sumberdaya manusia pertanian merupakan kendala yang serius dalam pembangunan pertanian, karena mereka yang berpendidikan rendah pada umumnya adalah petani yang tinggal di daerah pedesaan. Kondisi ini juga semakin diperparah dengan kurangnya pendampingan penyuluhan pertanian. Di sisi lain, bagi mereka yang telah mengenyam pendidikan formal tingkat menengah dan tinggi, mereka kurang tertarik bekerja dan berusaha di pertanian, sehingga mengakibatkan tingginya urbanisasi ke perkotaan. Kondisi ini dapat ditekan dengan mengembangkan agroindustri pertanian di pedesaan, karena akan mampu menciptakan lapangan kerja baru dan peluang usaha agroindustri di pedesaan. Agroindustri di desa ini memegang peran penting dalam proses produksi seperti penyediaan dan distribusi sarana produksi, usaha jasa pelayanan alat dan mesin pertanian.

**Penyebab Keempat,** Kurang maksimalnya kelembagaan penyuluh. Pendekatan kelembagaan telah menjadi strategi penting dalam pembangunan pertanian. Pengembangan kelembagaan pertanian baik formal maupun informal belum memberikan peran berarti di perdesaan. Hal ini disebabkan oleh peran antar lembaga pendidikan dan pelatihan, Balai Penelitian dan Penyuluhan (BPP) belum terkoordinasi dengan baik. Fungsi dan keberadaan lembaga penyuluhan cenderung terabaikan. Koordinasi dan kinerja lembaga



keuangan perbankan perdesaan masih rendah. Koperasi perdesaan yang bergerak di sektor pertanian masih belum berjalan optimum. Keberadaan lembaga-lembaga tradisional di perdesaan belum dimanfaatkan secara optimal.

**Penyebab Kelima,** Rendahnya produksi hortikultura. Upaya pengembangan buah-buahan lokal memerlukan perhatian dan keseriusan dari berbagai pihak pemangku kepentingan, mulai dari pihak perencana dan pembuat kebijakan hingga pelaksana di lapangan, juga menyangkut peran serta masyarakat sebagai konsumen buah-buahan. Rendahnya produksi juga menyangkut berbagai aspek mulai dari produksi (on farm dan off farm), distribusi hingga konsumsi, antara lain sebagai berikut: (1) program-program pemerintah yang terkait dengan pengembangan buah-buahan, (2) perlu dikembangkan varietas buah lokal, (3) terkait dengan skala teknis diperlukan komitmen pemerintah.

**Penyebab Keenam,** Belum maksimalnya peningkatan nilai tambah hasil pertanian. Nilai tambah produk pertanian kurang maksimal sehingga petani kurang dapat menikmati keuntungan dari hasil pertanian. Petani banyak yang menjual produk pertanian tanpa olah terlebih dahulu seperti menjual gabah kering giling dan gabah kering panen. Keuntungan dapat dimaksimalkan dengan memberikan intervensi pada pengolahan hasil pertanian seperti mendorong petani untuk menjual beras.

**Penyebab Ketujuh,** Belum maksimalnya peran pasar pertanian. Untuk menjamin agar seluruh rumah tangga dapat memperoleh pangan yang cukup dalam jumlah maupun kualitas secara berkelanjutan, merupakan tantangan besar, mengingat masih ada sebagian masyarakat yang tidak mampu mengakses pangan yang cukup, penyebab utamanya adalah kemiskinan. Sebagian besar penduduk miskin adalah petani di perdesaan yang berperan sebagai produsen dan sekaligus sebagai konsumen. Selain itu, Indonesia sebagai negara kepulauan, yang jarak antar wilayah membutuhkan alat/sarana yang cukup dalam kelancaran distribusi pangan.

Masalah yang dijumpai dalam mendukung kelancaran distribusi dan akses pangan adalah : (1) infrastruktur distribusi, (2) sarana dan prasarana pasca panen, (3) pemasaran dan distribusi antar dan keluar daerah dan isolasi daerah, (4) sistem informasi pasar, (5) keterbatasan lembaga pemasaran daerah, (6) hambatan distribusi karena pungutan resmi dan tidak

resmi, (7) kasus penimbunan komoditas pangan oleh spekulasi, (8) adanya penurunan akses pangan karena terkena bencana.

#### **2.4.2. Peluang Pengembangan Pelayanan**

1. Memperluas dan mengoptimalkan pemanfaatan lahan pertanian
2. Meningkatkan produktivitas lahan
3. Meningkatkan produksi di sentra pertanian
4. Meningkatkan peran PPL
5. Memberdayakan peran kelompok tani
6. Meningkatkan produksi hortikultura
7. Memaksimalkan nilai tambah hasil pertanian
8. Memaksimalkan pemasaran hasil pertanian

## **BAB 3 PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS**

### **3.1. Identifikasi Permasalahan**

Penyusunan Renstra Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kubu Raya didasarkan pada berbagai macam permasalahan yang berkembang, baik dari lingkungan internal maupun eksternal Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Kubu Raya, yang tentunya berhubungan dengan tugas dan fungsi pelayanan Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian. Sumber daya yang ada dan tersedia harus dapat dimanfaatkan secara optimal guna terwujudnya pencapaian tujuan organisasi yang telah ditetapkan. Berdasarkan hasil analisis tugas pokok dan fungsi pelayanan ketahanan pangan dan Pertanian Kabupaten Kubu Raya, maka identifikasi permasalahan yang paling utama dihadapi saat ini adalah :

No	Bidang/ Urusan	Permasalahan	Faktor Permasalahan
1	KETERSEDIAAN DAN KERAWANAN PANGAN	<p>Adanya Keterbatasan kemampuan masyarakat dalam mengakses pangan meliputi keadaan infrastuktur transportasi desa serta tingkat kesejahteraan Masyarakat</p> <p>Kurangnya sosialisasi dan Sinergitas lintas sektoral dalam penanganan daerah rentan rawan pangan di Kab. Kubu Raya</p>	<p>Sinergitas lintas sektoral dalam penanganan daerah rentan rawan pangan belum maksimal seperti integrasi program antar OPD terkait di daerah rentan rawan pangan</p> <p>Peningkatan produksi pangan utama di Kabupaten Kubu Raya</p> <p>SDM di tingkat kelompok masyarakat untuk mengatasi rentan rawan pangan</p>

2	DISTRIBUSI DAN CADANGAN PANGAN	<p>-Masih kurangnya jumlah infrastruktur pendukung kemandirian pangan yang memadai di Kabupaten Kubu Raya seperti lumbung pangan, dan lantai jemur</p> <p>- Mutu gabah dan beras yang masih rendah.</p> <p>-Masih sedikitnya cadangan pangan pemerintah daerah (CPPD) Kab. Kubu Raya</p>	<p>-Untuk menambah jumlah lumbung pangan diharapkan ada dukungan pemerintah untuk membangun lumbung pangan maupun lantai jemur yang memadai melalui dana APBN atau APBD</p> <p>-Keterbatasan dana untuk pengadaan beras Cadangan Pangan Pemerintah Daerah (CPPD)</p>
---	--------------------------------------	--	--

3	KONSUMSI DAN KEAMANAN PANGAN	<p>Penganekaragaman konsumsi pangan masyarakat masih belum optimal terutama dari beras ke sumber karbohidrat lain non beras. Kualitas konsumsi masyarakat masih rendah di beberapa tempat terutama konsumsi energi dan protein</p> <p>Keterbatasan pengetahuan dan kesadaran tentang pentingnya konsumsi pangan yang Beragam, Bergizi Seimbang dan Aman (B2SA)</p> <p>Masih kurangnya pengetahuan dan keinginan pelaku utama/petani mendaftarkan sertifikasi produk pertanian / pangan segar asal tumbuhan yang dihasilkan</p>	<p>Belum terbiasanya masyarakat untuk menganekaragamkan / diversifikasi sumber karbohidrat dari beras ke jenis lain</p> <p>Adanya anggapan masyarakat bahwa <b>“Belum makan nasi, masih belum makan”</b></p> <p>Keterbatasan sumberdaya manusia (SDM) yang dimiliki ada untuk melakukan pengujian mutu dan keamanan pangan serta pengawasan serta Penyebaran informasi dan edukasi tentang mutu dan keamanan pangan segar asal tumbuhan (PSAT)</p>
---	------------------------------	--	--

4	<p>Produktivitas</p> <p>Komoditas</p> <p>Tanaman pangan dan Hortikultura</p>	<p>Angka produktivitas komoditas tanaman pangan dan hortikultura yang belum optimal</p> <p>Sarana dana prasarana pertanian yang masih belum tercukupi</p> <p>SDM pertanian yang kurang adaptif untuk perkembangan terbaru</p> <p>Penurunan luas lahan pertanian</p>	<p>Optimalisasi lahan pertanian yang belum maksimal</p> <p>Keterbatasan dana dalam rangka pengadaan sarana dan prasarana pertanian</p> <p>Pemberdayaan kelompok tani yang perlu di tingkatkan</p> <p>Alih fungsi lahan dari pertanian ke non pertanian ataupun perpindahan komoditas</p>
5	<p>Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian</p>	<p>Rendahnya pemahaman terhadap pengendalian OPT</p> <p>Tingkat kebakaran lahan pada saat musim kemarau yang tinggi</p>	<p>Kelompok tani belum adaptif terhadap teknologi penemuan yang disosialisasikan</p> <p>Kurangnya sosialisasi terhadap penanganan dan pengolahan lahan tanpa bakar</p>

6	Hilirisasi Pertanian	Rendahnya hilirisasi pertanian  Akses pasar yang belum terbentuk dengan baik	Kurangnya teknologi pengolahan hasil pertanian  Kelembagaan kelompok tani belum memiliki orientasi hilirisasi
7	Kesejahteraan petani	Rendahnya Tingkat kesejahteraan petani	Belum meningkatnya pendapatan petani

Pelaksanaan tugas dan fungsi Pelayanan Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kubu Raya sangat dipengaruhi oleh kondisi faktor internal dan faktor eksternal. Kondisi sumber daya manusia, dukungan anggaran, sarana dan prasarana serta kelembagaan dan tata laksana penyelenggaraan tugas, mempunyai peran besar terhadap keberhasilan pelaksanaan tugas dan fungsi dalam menghadapi dinamika pembangunan dan perubahan lingkungan strategis di Kabupaten Kubu raya. Sumber daya yang ada dan tersedia tersebut harus dapat dimanfaatkan secara optimal guna terwujudnya pencapaian tujuan organisasi sesuai visi, misi, tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Beberapa permasalahan yang dihadapi perlu segera dicarikan solusi penyelesaiannya agar potensi yang ada dapat dimanfaatkan secara optimal. Permasalahan internal yang masih dihadapi dalam pelaksanaan tugas dan fungsi pelayanan, diantaranya adalah:

- Masih terbatasnya jumlah sumber daya manusia dibandingkan dengan beban tugas yang harus dilaksanakannya
- Belum optimalnya dukungan sarana dan prasarana sebagai penunjang pelaksanaan tugas dan fungsi pelayanan
- Belum meratanya kapasitas dan kualitas sumber daya manusia sesuai kompetensinya
- Belum optimalnya koordinasi internal antar unit kerja/bidang dalam melaksanakan tugas sebagai tanggung jawabnya.



Disamping faktor internal diatas, beberapa faktor eksternal juga berpengaruh terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas pertanian Kabupaten Dharmasraya, diantaranya adalah:

- Globalisasi, yang merupakan faktor lingkungan eksternal(internasional) sangat berpengaruh terhadap pelaksanaan pembangunan pertanian termasuk didalamnya tugas dan fungsi pelayanan, seperti semakin terbukanya persaingan bebas dalam memasuki pasar global, arus perdagangan luar negeri, serta kemajuan dan perkembangan teknologi informasi;
- Peraturan perundang-undangan, berpengaruh dalam pelaksanaan manajemen pembangunan yang tidak dapat terlepas dari landasan dan acuan hukum yang berlaku, seperti Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, Keputusan Presiden, Peraturan Menteri, Keputusan Menteri Terkait, Peraturan Daerah, Peraturan Kepala Daerah, dan peraturan-peraturan lainnya. Berbagai peraturan tersebut, belum sepenuhnya terintegrasi secara sinergis sehingga dapat menimbulkan hambatan dalam pencapaian tujuan pembangunan nasional dan daerah.

### **3.2. Penentuan Isu-Isu Strategis**

Permasalahan Pembangunan periode 2025-2026 pada dasarnya merupakan peningkatan pelaksanaan pembangunan pada periode sebelumnya. Agar pembangunan dapat berjalan sesuai dengan yang direncanakan dan memenuhi target sasaran yang ditetapkan, diperlukan gambaran permasalahan yang akan dihadapi pada periode pembangunan kedepan.

Urgency, Seriousness, Growth (USG) adalah salah satu alat untuk menyusun urutan prioritas isu yang harus diselesaikan. Caranya dengan menentukan tingkat urgensi, keseriusan, dan perkembangan isu dengan menentukan skala nilai 1 – 5 atau 1 – 10. Isu yang memiliki total skor tertinggi merupakan isu prioritas. Untuk lebih jelasnya, pengertian urgency, seriousness, dan growth dapat diuraikan sebagai berikut :

#### **a. Urgency**

Seberapa mendesak isu tersebut harus dibahas dikaitkan dengan waktu yang tersedia serta seberapa keras tekanan waktu tersebut untuk memecahkan masalah yang menyebabkan isu tadi.

**b. Seriousness**

Seberapa serius isu tersebut perlu dibahas dikaitkan dengan akibat yang timbul dengan penundaan pemecahan masalah yang menimbulkan isu tersebut atau akibat yang menimbulkan masalah-masalah lain kalau masalah penyebab isu tidak dipecahkan. Perlu dimengerti bahwa dalam keadaan yang sama, suatu masalah yang dapat menimbulkan masalah lain adalah lebih serius bila dibandingkan dengan suatu masalah lain yang berdiri sendiri.

**c. Growth**

Seberapa kemungkinan-kemungkinannya isu tersebut menjadi berkembang dikaitkan kemungkinan masalah penyebab isu akan makin memburuk kalau dibiarkan.

Metode USG merupakan salah satu cara menetapkan urutan prioritas masalah dengan metode teknik scoring. Proses untuk metode USG dilaksanakan dengan memperhatikan urgensi dari masalah, keseriusan masalah yang dihadapi, serta kemungkinan bekembangnya masalah tersebut semakin besar. Hal tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

- 1) Urgensy atau urgensi, yaitu dilihat dari tersedianya waktu, mendesak atau tidak masalah tersebut diselesaikan.
- 2) Seriousness atau tingkat keseriusan dari masalah, yakni dengan melihat dampak masalah tersebut terhadap produktifitas kerja, pengaruh terhadap keberhasilan, membahayakan system atau tidak.
- 3) Growth atau tingkat perkembangan masalah yakni apakah masalah tersebut berkembang sedemikian rupa sehingga sulit untuk dicegah.

Penggunaan metode USG dalam penentuan prioriotas masalah dilaksanakan apabila pihak perencana telah siap mengatasi masalah yang ada, serta hal yang sangat dipentingkan adalah aspek yang ada dimasyarakat dan aspek dari masalah itu sendiri.

Berikut Merupakan table USG dalam menentukan Isu strategis:

Tabel 18. Penentuan Masalah Metode USG

No	Masalah/Isu	Kriteria			SKOR	PRIORITAS
		U	S	G		
1	Produktivitas Pertanian	4	4	4	12	3

2	Kesejahteraan Petani	5	4	4	13	2
3	Ketahanan Pangan	5	5	4	14	1
4	Penanggulangan Bencana Pertanian	4	3	4	11	4
5	Hilirisasi Pertanian	4	3	3	10	5

Berdasarkan hasil analisis tersebut menunjukkan bahwa isu (1) ketahanan pangan memiliki skor yang paling tinggi, disusul dengan (2) kesejahteraan petani, (3) Produktivitas Pertanian, (4) Penanggulangan bencana pertanian, dan (5) Hilirisasi Pertanian. dari isu tersebut diambil dua isu strategis utama yaitu ketahanan pangan dan kesejahteraan petani.

Pertama Ketahanan pangan, pada aspek ketahanan pangan terdapat unsur unsur penting yang perlu di jadikan permasalahan utama diantaranya adalah Ketersediaan pangan, Cadangan pangan, keamanan pangan konsumsi pangan Masyarakat. Unsur unsur tersebut sangat memenuhi unsur urgensi, keseriusan serta potensi penambahan masalah apabila tidak dijadikan isu utama.

Kedua, masih rendahnya tingkat kesejahteraan petani. Sasaran dari peningkatan kesejahteraan petani adalah meningkatnya pendapatan petani, meskipun peningkatan pendapatan petani tidak secara langsung mencerminkan peningkatan kesejahteraan karena tergantung pula dari tingkat pengeluaran dan faktor-faktor non finansial (sosial). Namun pendapatan petani merupakan indikator yang secara langsung terkait dengan tugas pokok dan fungsi Kementerian Pertanian, sehingga indikator dari sasaran peningkatan kesejahteraan petani adalah besaran pendapatan rumah tangga petani.

Kesejahteraan petani merupakan permasalahan multidimensi artinya penanganannya akan melibatkan banyak stakeholder sehingga dalam analisis pohon masalah tidak menjadi akar permasalahan di sektor pertanian. Akar permasalahan yang menjadi kewenangan Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian adalah produktivitas tanaman yang rendah. Diharapkan dengan meningkatkan produktivitas akan memberikan dampak lanjut terhadap penanganan kesejahteraan petani.

## **BAB 4. TUJUAN DAN SASARAN**

### **4.1. Tujuan dan Sasaran**

Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam periode tertentu, maka dirumuskan tujuan tahun 2025-2026 dibagi menjadi tiga urusan. pada urusan bidang pangan yaitu meningkatkan Ketahanan Pangan Kabupaten Kubu Raya. dengan indikator tujuan Skor Pola Pangan Harapan (PPH). Skor PPH merupakan susunan beragam pangan yang didasarkan atas proporsi keseimbangan energi dari berbagai kelompok pangan untuk memenuhi kebutuhan energi dan zat gizi lainnya, baik dalam jumlah maupun mutu dengan mempertimbangkan segi daya terima, ketersediaan pangan, ekonomi, budaya dan agama.

PPH merupakan instrumen untuk menilai situasi konsumsi pangan penduduk, baik jumlah maupun komposisi pangan menurut jenis pangan yang dinyatakan dalam skor PPH. Semakin tinggi skor PPH, konsumsi pangan semakin beragam dan bergizi seimbang (maksimal 100). Dipilihnya indikator Skor PPH, karena meskipun pangan tersedia dalam jumlah yang cukup bahkan berlebih namun bila tidak dapat terjangkau dan dikonsumsi, maka belum dapat memenuhi kebutuhan pangan manusia. Untuk dapat hidup sehat, cerdas, aktif dan berkelanjutan, manusia harus mengonsumsi pangan dalam jumlah yang cukup, beragam, bergizi seimbang dan aman (B2SA).

sedangkan pada urusan penunjang pemerintah adalah Meningkatnya tata kelola organisasi perangkat daerah dengan indikator Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Kubu Raya.

Sasaran merupakan hasil yang diharapkan dari tujuan yang telah ditetapkan oleh Dinas Ketahanan Pangan dan pertanian Kabupaten Kubu raya yang diuraikan pada table berikut:

Tabel 18. Tujuan dan Sasaran

Tujuan		Indikator Tujuan		Sasaran		Indikator Sasaran		Satuan	Kondisi Kinerja Pada Awal Periode Renstra (2023)	Target Kinerja Tujuan /Sasaran Pada Tahun	
										2025	2026
(1)		(2)		(3)		(4)		(5)	(6)	(7)	(8)
T.1	Meningkatnya Transparansi dan akuntabilitas Kinerja dan Keuangan	IT.1	Nilai SAKIP					Poin	B ( 62,13)	B ( 63,30)	B ( 63,89)
				S.1	Meningkatnya Transparansi dan akuntabilitas Kinerja dan Keuangan	IS.1	Nilai SAKIP SKPD	Poin		(B) 66,00	B(67,00)
T.2	Meningkatnya Daya Saing Daerah	IT.2	Pertumbuhan PDRB					Persen	4,98	5	5,5
				S.2	Meningkatnya Kesejahteraan Petani	IS.2	PDRB SubSektor Tanaman Pangan dan Hortikultura	Rupiah		580.000.000	590.000.000
				S.3	Meningkatkan Ketahanan Pangan Kubu Raya	IS.3	Skor PPH	Poin	72,67	74	82,27

Tabel 19. Cascading Kinerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kubu Raya

Masalah	Isu Strategis	Tujuan	Indikator Tujuan	Meta Indikator	Sasaran	Indikator Sasaran	Meta Indikator
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8
Masih kurang optimalnya pelayanan oleh perangkat daerah dalam budaya kerja serta tata kelola pemerintah baik dari Sumber Daya Manusia (SDM) serta Anggaran yang tersedia dalam mencapai kinerja yang profesional, berkualitas dan bermutu	Melakukan perencanaan, peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) yang unggul serta profesional dalam implementasi kebijakan sesuai tugas dan fungsi	Meningkatnya Transparansi dan akuntabilitas Kinerja dan Keuangan	Nilai SAKIP	Hasil Evaluasi Pelayanan SAKIP yang di keluarkan Kemenpan -RB	Meningkatnya Transparansi dan akuntabilitas Kinerja dan Keuangan	Nilai SAKIP SKPD	Hasil Evaluasi Pelayanan SAKIP yang di keluarkan oleh Inspektorat
Belum maksimalnya tingkat Ketahanan Pangan Kabupaten Kubu Raya yang terdiri dari aspek Ketersediaan Pangan, Cadangan pangan, Pola pangan Harapan , serta Keamanan Pangan.	Melakukan Perencanaan, pelaksanaan serta kolaborasi yang tepat dari berbagai lini sektor pemerintahan dalam rangka peningkatan ketahanan pangan Kabupaten Kubu Raya	Meningkatkan Daya Saing Kubu Raya	Peningkatan PDRB	Pertumbuhan Angka PDRB Kubu Raya	Meningkatkan Ketahanan Pangan Kubu raya	Skor PPH	$\text{Skor PPH} = \text{Skor PPH Padi-Padian (1)} + \text{Skor PPH Umbi-Umbian (2)} + \text{Skr PPH Pangan Hewani (3)} + \text{Skor PPH Minyak dan Lemak (4)} + \text{Skor PPH Buah/ Biji Berminyak (5)} + \text{Skor PPH Kacang-Kacangan (6)} + \text{Skor PPH Gula (7)} + \text{Skor PPH Sayur dan Buah (8)} + \text{Skor PPH Lain-Lain (9)}$
Masih Kurangnya Tingkat Kesejahteraan Petani di kabupaten Kubu Raya	Peningkatan hasil produksi serta hilirisasi dibidang pertanian.	Meningkatkan Daya Saing Kubu Raya	Peningkatan PDRB	Pertumbuhan Angka PDRB Kubu Raya	Menigkatkan Kesejahteraan Petani	PDRB Sektor Pertanian	Laporan hasil Perhitungan Badan Pusat Statistik

## **BAB 5. STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN**

### **5.1. Penentuan Strategi dan Arah Kebijakan**

Untuk mengetahui strategi pembangunan pertanian di Kabupaten Kubu Raya dilakukan dengan menggunakan analisis SWOT (Strengths, Weaknesses, Opportunities dan Threats). Analisis ini dilakukan dengan menerapkan kriteria kesesuaian dengan data kuantitatif dan deskripsi. Pembobotan dan scoring dalam analisis SWOT ini dilakukan berdasarkan hasil wawancara tersebut yang kemudian dijustifikasi dalam bentuk bobot dan skor. Menurut Rangkuti (2004) ada beberapa langkah yang dilakukan dalam analisis SWOT, yaitu sebagai berikut.

#### **5.1.1. Tahap pengumpulan data.**

Tahap ini merupakan suatu kegiatan pengklasifikasian dan pra analisis. Pada tahap ini data dibedakan menjadi dua, yaitu data eksternal dan data internal. Data eksternal berasal dari lingkungan luar (peluang dan ancaman), sedangkan data internal berasal dari dalam (kekuatan dan kelemahan). Tahap ini menggunakan dua model matriks faktor strategi internal. Adapun matriks faktor strategi internal disusun dengan langkah-langkah sebagai berikut :

- a) Pada kolom satu disusun kekuatan-kekuatan dan kelemahan-kelemahan.
- b) Pada kolom dua diberi bobot terhadap masing-masing faktor, mulai dari 1,0 (paling penting) sampai dengan 0,0 (tidak penting), jumlah bobot untuk semua faktor kekuatan dan kelemahan sama dengan 1,0.
- c) Nilai bobot diperoleh dari rata-rata masing-masing pertanyaan dibagi dengan total rata-rata pertanyaan yang diberikan oleh responden.
- d) Pada kolom tiga diberi skala rating mulai dari 4 (Outstanding) sampai dengan 1 (Poor), berdasarkan pengaruh faktor tersebut terhadap kondisi pengembangan pengembangan pertanian di Kabupaten Kubu Raya. Pemberian nilai rating untuk kekuatan bersifat positif (nilai 4 = Sangat besar, 3 = Besar, 2 = Sedang, dan 1 = Kecil), sedangkan pemberian nilai rating untuk kelemahan bersifat negative (4 = Kecil, 3 = Sedang, 2 = Besar, dan 1 = Sangat Besar).
- d) Masing-masing besaran rating merupakan rata-rata dari penilaian yang diberikan oleh responden;
- e) Pada kolom empat diisi nilai hasil perkalian bobot dan rating suatu faktor yang sama. Nilai hasil kali tersebut merupakan skor pembobotan dari faktor tersebut.
- f) Pada kolom lima diberi komentar atau catatan mengapa faktor-faktor tertentu dipilih dan bagaimana skor pembobotannya dihitung.

g) Menjumlahkan skor pembobotan pada kolom empat.

Matriks faktor strategi eksternal disusun dengan langkah-langkah sebagai berikut:

- a) Pada kolom satu disusun peluang-peluang dan ancaman-ancaman.
- b) Selanjutnya pada kolom dua diberi bobot terhadap masing-masing faktor peluang dan ancaman, mulai dari 1,0 (sangat penting), sampai 0,0 (tidak penting). Jumlah bobot untuk semua faktor peluang dan ancaman sama dengan 1,0.
- c) Pada kolom tiga diberi skala rating mulai dari 4 sampai dengan 1, berdasarkan pengaruh faktor tersebut terhadap kondisi pengembangan pertanian di Kabupaten Kubu Raya. Pemberian nilai rating untuk peluang bersifat positif (nilai 4 = sangat besar, 3 = besar, 2 = sedang, dan 1 = kecil), sedangkan pemberian nilai rating untuk ancaman bersifat negatif (nilai 4 = Kecil, 3 = sedang, 2 = besar, dan 1 = sangat besar).
- d) Pada kolom empat diisi nilai hasil perkalian bobot dan rating suatu faktor yang sama. Nilai hasil kali tersebut merupakan skor pembobotan dari faktor tersebut.
- e) Pada kolom lima diberi komentar atau catatan mengapa faktor-faktor tertentu dipilih dan bagaimana skor pembobotannya dihitung.
- f) Menjumlahkan skor pembobotan pada kolom empat. Nilai tersebut menunjukkan bagaimana sistem bereaksi terhadap faktor –faktor strategi eksternalnya.

#### 1.1.2. Tahap Analisis Data.

Pada tahap ini, setelah semua informasi terkumpul, selanjutnya memanfaatkan semua informasi tersebut dalam model-model kuantitatif perumusan strategi. Analisis data yang digunakan adalah model analisis SWOT, dimana terdapat empat strategi yang dapat dihasilkan, yaitu strategi SO, WO, ST, dan WT.

#### 1.1.3. Tahap Pengambilan Keputusan.

Pada tahap ini, mengkaji ulang dari empat strategi yang telah dirumuskan dalam tahap analisis. Setelah itu diambil keputusan dalam menentukan strategi yang paling menguntungkan, efektif dan efisien bagi organisasi berdasarkan Matriks SWOT dan pada akhirnya dapat disusun suatu rencana strategi yang akan dijadikan pegangan dalam melakukan kegiatan selanjutnya.



No	Faktor	Bobot	Rating	Skor
KEKUATAN (S)				
1	Kebijakan Pemda	0,17	5,00	0,83
2	Sumber Daya Lahan	0,13	4,50	0,60
3	Hinterland Kota Pontianak	0,10	4,00	0,40
4	Sumber Daya Manusia	0,07	3,50	0,23
5	Kondisi Agroklimat	0,03	3,00	0,10
	Jumlah	0,50		2,17
KELEMAHAN (W)				
1	Sarana dan Prasarana Pertanian	0,17	2,50	0,42
2	Kelembagaan Pertanian	0,13	2,30	0,31
3	Akses Permodalan	0,10	2,00	0,20
4	Produktivitas dan Mutu Hasil Pertanian	0,07	1,90	0,13
5	Kerjasama antar Stakeholder	0,03	1,50	0,05
	Jumlah	0,50		1,10
	Total Faktor Internal	1,00		3,27

Sumber: Fungsional Perencana DKPP (2020).

No	Faktor	Bobot	Rating	Skor
PELUANG (O)				
1	Permintaan Beras	0,17	5,00	0,83
2	Optimalisasi Lahan Pertanian	0,13	4,50	0,60
3	Pemanfaatan Teknologi Pertanian	0,10	4,00	0,40
4	Pembiayaan Berbagai Sektor	0,07	3,50	0,23
5	Kebijakan Otonomi Daerah	0,03	3,00	0,10
	Jumlah	0,50		2,17
ANCAMAN (T)				
1	Penurunan Minat Tenaga Kerja Pertanian	0,17	1,00	0,17
2	Tingkat Kesejahteraan Petani Masih Rendah	0,13	1,20	0,16
3	Alih Fungsi Lahan Pertanian	0,10	2,00	0,20
4	Globalisasi dan Pasar Bebas	0,07	2,50	0,17
5	Perubahan Iklim	0,03	2,90	0,10
	Jumlah	0,50		0,79
	Total Faktor Eksternal	1,00		2,96

Sumber: Fungsional Perencana DKPP (2020).

Berdasarkan penilaian IFAS (Internal Faktor Analisis System) dan EFAS (Eksternal Faktor Analisis System) yang dilakukan pada strategi pengembangan pertanian di Kabupaten Kubu Raya, dihasilkan nilai total rata-rata IFAS sebesar 3,27 dengan skor kekuatan sebesar 2,17 atau (66.33 %) dan nilai kelemahan sebesar 1,10 atau (33.67%). Nilai total rata-rata EFAS sebesar 2.96 dari nilai peluang sebesar 2,17 atau (73.28 %) dan nilai ancaman sebesar 0.79 (26.72%).

Untuk mengetahui pengembangan pertanian di Kabupaten Kubu Raya berdasarkan penilaian faktor internal dan eksternal, maka dilakukan pengurangan antara jumlah kekuatan dan kelemahan pada sumbu (X), dan

pengurangan antara jumlah peluang dan ancaman untuk sumbu (Y) maka nilai.

$$X = (S-W) = 2,17 - 1,10 = 1.07$$

$$Y = (O-T) = 1,75 - 1,29 = 1.38$$

Dengan demikian diperoleh angka pada kedua sumbu (X dan Y = 1.07 dan 1.38 yang bernilai positif terhadap pengembangan pertanian di Kabupaten Kubu Raya, untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada gambar berikut. Hasil analisis data pada diagram SWOT diperoleh koordinat 1.07;1.38 yang mana koordinat ini berada pada kuadrat 1 yaitu strategi agresif. Strategi ini menunjukan situasi yang sangat menguntungkan. Pengembangan pertanian di Kabupaten Kubu Raya memiliki kekuatan dan peluang yang sifatnya menyatu dan saling mendukung, yaitu dengan cara menggunakan faktor semua kekuatan untuk memanfaatkan peluang yang ada.

Berdasarkan hasil analisis SWOT tersebut di atas maka Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Kubu Raya menyusun strategi arah kebijakan yaitu;

Meningkatkan Kualitas Penyediaan Infrastruktur dan Seluruh Pendukung Kemandirian Pangan Sesuai Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota, Meningkatkan Kualitas Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam Rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan, Meningkatkan Kualitas Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten/Kota, Meningkatkan Kualitas Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi, Meningkatkan Kualitas Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan Kecamatan, Meningkatkan Kualitas Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten/Kota, Meningkatkan Kualitas Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian, Meningkatkan Kualitas Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/ Kota, Meningkatkan Kualitas Pengembangan Prasarana Pertanian, Meningkatkan Kualitas Pembangunan Prasarana Pertanian, Meningkatkan Kualitas Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota, Meningkatkan Kualitas Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian, Meningkatkan Kualitas Administrasi Umum Perangkat Daerah, Meningkatkan Kualitas Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urus Pemerintah Daerah, Meningkatkan Kualitas Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah

Daerah, Meningkatkan Kualitas Pemeliharaan Barang Milik Daerah  
Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah,

Tabel 19. Strategi dan Arah Kebijakan

Tujuan		Sasaran		Strategi		Arah Kebijakan	
(1)		(2)		(3)		(4)	
T1	Meningkatnya Transparansi dan akuntabilitas Kinerja dan Keuangan	S1	Meningkatnya Transparansi dan akuntabilitas Kinerja dan Keuangan	ST.1	Meningkatkan Kualitas Pengelolaan Urusan Pemerintahan Daerah	AK.1	Meningkatkan Kualitas Administrasi Umum Perangkat Daerah
						AK.2	Meningkatkan Kualitas Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
						AK.3	Meningkatkan Kualitas Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
						AK.4	Meningkatkan Kualitas Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

					Meningkatkan Kualitas Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi Untuk Meningkatkan Kedaulatan dan Kemandirian Pangan		Meningkatkan Kualitas Penyediaan Infrastruktur dan Seluruh Pendukung Kemandirian Pangan Sesuai Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota
T.2	Meningkatkan Daya Saing Daerah	S.1	Meningkatkan Ketahanan Pangan Kubu Raya	ST.2.		AK.5	
				ST.3.	Meningkatkan Kualitas Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat	AK.6	Meningkatkan Kualitas Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam Rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan
						AK.7	Meningkatkan Kualitas Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten/Kota
						AK.8	Meningkatkan Kualitas Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi

				ST.3	Meningkatkan Kualitas Pelayanan Dalam Penanganan Kerawanan Pangan	AK.5	Menigkatkan Kualitas Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan Kecamatan
						AK.6	Meningkatkan Kualitas Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten/Kota
				ST.4	Meningkatkan Kualitas dan Kuantitas Pengawasan Keamanan Pangan	AK.7	Meningkatkan Kualitas Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota
		S.2	Meningkanya Kesejahteraan Petani	ST.5	Meningkatkan Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	AK.8	Meningkatkan Kualitas Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian
						AK.9	Meningkatkan Kualitas Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/ Kota
				ST.6	Meningkatkan Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian	AK.10	Meningkatkan Kualitas Pengembangan Prasarana Pertanian

						AK.11	Meningkatkan Kualitas Pembangunan Prasarana Pertanian
				ST.7	Meningkatkan Kualitas Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian	AK.12	Meningkatkan Kualitas Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota
				ST.8	Meningkatkan Kualitas dan Kuantitas Penyuluhan Pertanian	AK.13	Meningkatkan Kualitas Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian



BAB 6. PROGRAM, KEGIATAN DAN PENDANAAN

6.1. Rencana Program Prioritas dan Penunjang

Tabel 20. Rencana program dan kegiatan

Tujuan		Sasaran		Kode				Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan		Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Unit Kerja Peringkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi
									Indikator	Satuan		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra			
(1)		(2)		(3)				(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
T1	Meningkatnya Transparansi dan Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan	S1	Meningkatnya Capaian Nilai SAKIP	X	XX			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PILIHAN								.....	.....		
				X	XX	01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN /KOTA	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Poin	B (62,13)	B (63,30)	Rp 15.982.250.000	B (63,89)			Rp 15.982.250.000	DKPP KKR	KUBURAYA
				X	XX	01	2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	Dokumen	1	1	Rp 324.000.000	Rp 1	Rp 348.650.000	1	Rp 672.650.000	DKPP KKR	KUBURAYA

				X	X X	0 1	2, 0 1	00 01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokum en		4	Rp 181.500.000	4	Rp 199.650.000	8	Rp 381.150.000	DKPP KKR	KUBU RAYA
				X	X X	0 1	2, 0 1	00 07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Lapora n		4	Rp 142.500.000	4	Rp 149.000.000	8	Rp 291.500.000	DKPP KKR	KUBU RAYA
				X	X X	0 1	2, 0 2		<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>Persentase Kualitas Administras i Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>Persen</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>Rp 13.940.000.0 00</b>	<b>100</b>	<b>Rp 14.664.000.0 00</b>	<b>200</b>	<b>Rp 28.604.000.0 00</b>	<b>DKPP KKR</b>	<b>KUBU RAYA</b>
				X	X X	0 1	2, 0 2	00 01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/ bulan		140	Rp 13.800.000.00 0	140	Rp 14.500.000.00 0	280	Rp 28.300.000.00 0	DKPP KKR	KUBU RAYA
				X	X X	0 1	2, 0 2	00 03	Pelaksanaan Penatausaha an dan Pengujian/Ve rifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausaha an dan Pengujian/V erifikasi Keuangan SKPD	Dokum en		4	Rp 40.000.000	4	Rp 42.000.000	8	Rp 82.000.000	DKPP KKR	KUBU RAYA
				X	X X	0 1	2, 0 2	00 05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Lapora n		1	Rp 40.000.000	1	Rp 42.000.000	2	Rp 82.000.000	DKPP KKR	KUBU RAYA
				X	X X	0 1	2, 0 3		<b>Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</b>	<b>Persentase Kualitas Administras i Barang Milik</b>	<b>Persen</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>Rp 30.000.000</b>	<b>100</b>	<b>Rp 40.000.000</b>	<b>200</b>			

										<b>Daerah pada Perangkat Daerah</b>										
				X	X	0	2,03	00	Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Laporan		1	Rp 30.000.000	1	Rp 40.000.000	2	Rp 70.000.000	DKPP KKR	KUBU RAYA
				X	X	0	2,05		<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	<b>Persentase Kualitas Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	<b>Persen</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>Rp 600.250.000</b>		<b>Rp 638.330.000</b>	<b>100</b>			
				X	X	0	2,05	00	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Paket		1	Rp 112.500.000	1	Rp 118.125.000	2	Rp 230.625.000	DKPP KKR	KUBU RAYA
				X	X	0	2,05	00	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Dokumen		1	Rp 30.000.000	1	Rp 50.000.000	2	Rp 80.000.000	DKPP KKR	KUBU RAYA
				X	X	0	2,05	00	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Orang		16	Rp 372.750.000	20	Rp 380.205.000	36	Rp 752.955.000	DKPP KKR	KUBU RAYA

				X	X X	0 1	2, 0 5	00 10	Sosialisasi Peraturan Perundang- Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang- Undangan	Orang		50	Rp 35.000.000	50	Rp 40.000.000	100	Rp 75.000.000	DKPP KKR	KUBU RAYA
				X	X X	0 1	2, 0 5	00 11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang- Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementas i Peraturan Perundang- Undangan	Orang		3	Rp 50.000.000	3	Rp 50.000.000	6	Rp 100.000.000	DKPP KKR	KUBU RAYA
				X	X X	0 1	2, 0 6		<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>Persentase Kualitas Adminstras i Umum Perangkat Daerah</b>	<b>Persen</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>Rp 266.000.000</b>	<b>Rp 100</b>	<b>Rp 283.000.000</b>	<b>200</b>	<b>Rp 549.000.000</b>	<b>DKPP KKR</b>	<b>KUBU RAYA</b>
				X	X X	0 1	2, 0 6	00 01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Pener angan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Pene rangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket		1	Rp 20.000.000	1	Rp 25.000.000	2	Rp 45.000.000	DKPP KKR	KUBU RAYA
				X	X X	0 1	2, 0 6	00 04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket		1	Rp 21.000.000	1	Rp 25.000.000	2	Rp 46.000.000	DKPP KKR	KUBU RAYA
				X	X X	0 1	2, 0 6	00 05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket		1	Rp 10.000.000	1	Rp 12.000.000	2	Rp 22.000.000	DKPP KKR	KUBU RAYA
				X	X X	0 1	2, 0 6	00 06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-	Dokum en		1	Rp 5.000.000	1	Rp 6.000.000	2	Rp 11.000.000	DKPP KKR	KUBU RAYA

									Undangan yang Disediakan											
				X	X	01	2,06	0009	Penyelenggaran Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaran Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan		100	Rp 200.000.000	100	Rp 205.000.000	200	Rp 405.000.000	DKPP KKR	KUBU RAYA
				X	X	01	2,06	0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Dokumen		1	Rp 10.000.000	1	Rp 10.000.000	2	Rp 20.000.000	DKPP KKR	KUBU RAYA
				X	X	01	2,07		<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>Jumlah Pengadaan Barang Milik Daerah</b>	<b>Unit</b>		20	<b>Rp 30.000.000</b>	20	<b>Rp 30.000.000</b>	40	<b>Rp 60.000.000</b>	<b>DKPP KKR</b>	<b>KUBU RAYA</b>
				X	X	01	2,07	0005	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Unit		20	Rp 30.000.000	20	Rp 30.000.000	40	Rp 60.000.000	DKPP KKR	KUBU RAYA
				X	X	01	2,08		<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah</b>	<b>Laporan</b>	1	1	<b>Rp 400.000.000</b>	1	<b>Rp 430.000.000</b>	2	<b>Rp 830.000.000</b>	<b>DKPP KKR</b>	<b>KUBU RAYA</b>
				X	X	01	2,08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	1	1	Rp 120.000.000	1	Rp 130.000.000	2	Rp 250.000.000	DKPP KKR	KUBU RAYA

				X	X	0	2,08	00	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	2	2	Rp 280.000.000	2	Rp 300.000.000	4	Rp 580.000.000	DKPP KKR	KUBU RAYA
				X	X	0	2,09			<b>Pemeliharaan n Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	Jumlah Pemeliharaan n Barang Milik Daerah (%)	<b>Persen</b>		100	<b>Rp 392.000.000</b>	100	<b>Rp 427.000.000</b>	200	<b>Rp 819.000.000</b>	<b>DKPP KKR</b>	<b>KUBU RAYA</b>
				X	X	0	2,09	00	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan , Biaya Pemeliharaan , dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Unit		1	Rp 32.000.000	1	Rp 32.000.000	2	Rp 64.000.000	DKPP KKR	KUBU RAYA
				X	X	0	2,09	00	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan , Biaya Pemeliharaan , Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit		40	Rp 120.000.000	40	Rp 125.000.000	80	Rp 245.000.000	DKPP KKR	KUBU RAYA
				X	X	0	2,09	00	07	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara	Unit		10	Rp 40.000.000	10	Rp 50.000.000	20	Rp 90.000.000	DKPP KKR	KUBU RAYA
				X	X	0	2,09	00	09	Pemeliharaan /Rehabilitasi Gedung Kantor dan	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Unit		4	Rp 200.000.000	9	Rp 220.000.000	13	Rp 420.000.000	DKPP KKR	KUBU RAYA

									Bangunan Lainnya	yang Dipelihara/D irehabilitasi										
				2	09				URUSAN PEMERINTAH AN BIDANG PANGAN							0	Rp -	DKPP KKR	KUBU RAYA	
T. 2.	Meningkatkan Daya Saing Daerah	S. 1.	Meningkatkan Ketahanan Pangan Kubu raya	2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	#VALUE!	#VALUE!	DKPP KKR	KUBU RAYA
				2	09				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN							0	Rp -	DKPP KKR	KUBU RAYA	
				2	09	02			PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN dan KEMANDIRIAN PANGAN		unit	0	1	Rp 1.000.000.000	1	Rp 1.000.000.000	2	Rp 2.000.000.000	DKPP KKR	KUBU RAYA
				2	09	02	2,01	0006	Penyediaan Infrastruktur Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Infrastruktur Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/ Kota yang tersedia	unit	0	1	Rp 1.000.000.000	1	Rp 1.000.000.000	2	Rp 2.000.000.000	DKPP KKR	KUBU RAYA
				2	09	03			PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN	SKOR PPH	SKOR	72,57	79,04	Rp 1.000.000.000	82,27	161	Rp 1.000.000.000	DKPP KKR	KUBU RAYA	

									MASYARAKAT											
				2	09	03	2,01		Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/ Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan	Jumlah Laporan Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/ Kota dalam Rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (Laporan)	LAPORAN		1	Rp 600.000.000	Rp 4	Rp 600.000.000	Rp 5	Rp 1.200.000.000		
				2	09	03	2,01	0008	Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan Tingkat Produsen dan Konsumen di Kabupaten/ Kota	Jumlah kegiatan Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan Tingkat Produsen dan Konsumen di Kabupaten/ Kota	laporan	0	1	Rp 300.000.000	1	Rp 300.000.000	2	Rp 600.000.000	DKPP KKR	KUBU RAYA
				2	09	03	2,01	0012	Penyediaan Informasi Harga Pangan Tingkat Produsen dan Konsumen Wilayah Kabupaten/ Kota	Informasi harga pangan tingkat Produsen dan Konsumen wilayah Kabupaten/ Kota	Laporan	1	1	Rp 100.000.000	1	Rp 100.000.000	2	Rp 200.000.000	DKPP KKR	KUBU RAYA



				2	0	0	2,01	0013	Penyusunan Prognosa Neraca Pangan Wilayah Kabupaten/Kota	Informasi Prognosa Neraca Pangan Wilayah Kabupaten/Kota	Dokumen	1	1	Rp 100.000.000	1	Rp 100.000.000	2	Rp 200.000.000	DKPP KKR	KUBU RAYA
				2	0	0	2,01	0016	Penyusunan Neraca Bahan Makanan (NBM)	Informasi Neraca Bahan Makanan (NBM)	Dokumen	1	1	Rp 100.000.000	1	Rp 100.000.000	2	Rp 200.000.000	DKPP KKR	KUBU RAYA
				2	0	0	2,04		<b>Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi</b>	<b>Jumlah Laporan Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi (Laporan)</b>	<b>LAPORAN</b>	1	1	Rp 400.000.000	1	Rp 400.000.000	2	Rp 800.000.000	<b>DKPP KKR</b>	<b>KUBU RAYA</b>
				2	0	0	2,04	0001	Penyusunan dan Penetapan Target Konsumsi Pangan Per Kapita Per Tahun	Target Konsumsi Pangan Per Kapita Per Tahun	Dokumen	1	1	Rp 100.000.000	1	Rp 100.000.000	2	Rp 200.000.000	DKPP KKR	KUBU RAYA
				2	0	0	2,04	0002	Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	Jumlah Pemberdayaan Kelompok Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	Laporan	1	1	Rp 300.000.000	1	Rp 300.000.000	2	Rp 600.000.000	DKPP KKR	KUBU RAYA
				2	0	0			<b>PROGRAM PENANGANA</b>	<b>Persentase Daerah</b>	<b>PERSENTASE</b>	1,69	11	Rp 1.100.000.000	10	Rp 1.100.000.000	21	Rp 2.200.000.000	<b>DKPP KKR</b>	<b>KUBU RAYA</b>

									N KERAWANAN PANGAN	Rentan Rawan Pangan										
				2	0 9	0 4	2, 0 1	00 01	Penyusunan, Pemutakhiran dan Analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan	Peta dan Analisis Ketahanan dan Kerentanan Pangan yang Dimutakhirkan	Dokumen	1	1	Rp 200.000.000	1	Rp 200.000.000	2	Rp 400.000.000	DKPP KKR	KUBU RAYA
				2	0 9	0 4	2, 0 2	00 02	Pelaksanaan Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan pada Kerawanan Pangan yang Mencakup dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan pada Kerawanan Pangan yang Mencakup dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Dokumen	1	1	Rp 500.000.000	1	Rp 500.000.000	2	Rp 1.000.000.000	DKPP KKR	KUBU RAYA
				2	0 9	0 4	2, 0 2	00 04	Pelaksanaan Intervensi Kewaspadaan Pangan dan Gizi	Jumlah Intervensi Kewaspadaan Pangan dan Gizi	Dokumen	0	1	Rp 200.000.000	1	Rp 200.000.000	2	Rp 400.000.000	DKPP KKR	KUBU RAYA
				2	0 9	0 4	2, 0 2	00 05	Penyusunan Peta Situasi Kewaspadaan Pangan dan Gizi Kabupaten/Kota	Jumlah Peta Situasi Kewaspadaan Pangan dan Gizi Kabupaten/Kota	Dokumen	1	1	Rp 200.000.000	1	Rp 200.000.000	2	Rp 400.000.000	DKPP KKR	KUBU RAYA
				2	0 9	0 5			PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN	Pengawasan dan Pembinaan Keamanan Pangan	PERSENTASE	100	100	Rp 200.000.000	100	Rp 200.000.000	100	Rp 400.000.000	DKPP KKR	KUBU RAYA

				2	0	0	2,01		Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Laporan Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/ Kota (Laporan)	LAPORAN	1	1	Rp 200.000.000	1	Rp 200.000.000	2	Rp 400.000.000	DKPP KKR	KUBU RAYA
				2	0	0	2,01	0004	Rekomendasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Rekomendasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/ Kota	Dokumen	1	1	Rp 200.000.000	1	Rp 200.000.000	2	Rp 400.000.000	DKPP KKR	KUBU RAYA
																	0	Rp -	DKPP KKR	KUBU RAYA
T. 2	Meningkatkan Daya Saing Daerah	S. 1.	Meningkatkan Kesejahteraan Petani	3	2	7			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN								0	Rp -	DKPP KKR	KUBU RAYA
				3	2	0	2		PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Produktivitas Pertanian (Ton/Ha)	Ton / Ha	2,86	3	Rp 1.335.997.404	3,1	Rp 1.620.997.404	6	Rp 2.956.994.808	DKPP KKR	KUBU RAYA
				3	2	0	2,01		Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian	Jumlah Laporan Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian (Laporan)	Laporan	1	1	Rp 795.000.000	Rp 1	Rp 975.000.000	2	Rp 1.770.000.000	DKPP KKR	KUBU RAYA

				3	2	0	2,01	0001	Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi	Jumlah Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi	Laporan	1	1	Rp 200.000.000	1	Rp 200.000.000	2	Rp 400.000.000	DKPP KKR	KUBU RAYA
				3	2	0	2,01	0002	Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	Jumlah Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	Laporan	1	1	Rp 195.000.000	1	Rp 260.000.000	2	Rp 455.000.000	DKPP KKR	KUBU RAYA
				3	2	0	2,01	0003	Perbanyakan Benih Bersertifikat Tanaman Pangan Berbentuk Biji/Benih	Jumlah benih bersertifikat tanaman pangan berbentuk biji/benih yang diperbanyak	Ton		20	Rp 160.000.000	30	Rp 255.000.000	50	Rp 415.000.000	DKPP KKR	KUBU RAYA
				3	2	0	2,01	0004	Perbanyakan Benih Bersertifikat Tanaman Pangan Berbentuk Setek	Jumlah benih bersertifikat tanaman pangan berbentuk Setek yang diperbanyak	Setek		5000	Rp 30.000.000	10000	Rp 40.000.000	15000	Rp 70.000.000	DKPP KKR	KUBU RAYA
				3	2	0	2,01	0005	Pengawasan Penggunaan Sarana Pengolahan Hasil Tanaman Pangan	Jumlah pengawasan penggunaan sarana pengolahan hasil tanaman pangan	Laporan		1	Rp 75.000.000	1	Rp 75.000.000	2	Rp 150.000.000	DKPP KKR	KUBU RAYA
				3	2	0	2,01	0007	Pengawasan Penggunaan Sarana Pengolahan	Jumlah pengawasan penggunaan sarana pengolahan	Laporan		1	Rp 20.000.000	1	Rp 25.000.000	2	Rp 45.000.000	DKPP KKR	KUBU RAYA

									Hasil Hortikultura	hasil hortikultura										
				3	27	02	2,01	0014	Pengawasan Penggunaan Sarana Pascapanen Tanaman Pangan	Jumlah pengawasan penggunaan sarana pascapanen tanaman pangan	Laporan		1	Rp 90.000.000	1	Rp 90.000.000	2	Rp 180.000.000	DKPP KKR	KUBU RAYA
				3	27	02	2,01	0016	Pengawasan Penggunaan Sarana Pascapanen Hortikultura	Jumlah pengawasan penggunaan sarana pascapanen hortikultura	Laporan	0	1	Rp 25.000.000	1	Rp 30.000.000	2	Rp 55.000.000	DKPP KKR	KUBU RAYA
				3	27	02	2,02		<b>Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/ Kota</b>	<b>Jumlah Laporan Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/ Kota (Laporan)</b>	<b>LAPORAN</b>	1	1	<b>Rp 540.997.404</b>	1	<b>Rp 645.997.404</b>	2	Rp 1.186.994.808	DKPP KKR	KUBU RAYA
				3	27	02	2,02	0002	Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman	Jumlah Pelaksanaan Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman	Dokumen	1	1	Rp 130.000.000	1	Rp 150.000.000	2	Rp 280.000.000	DKPP KKR	KUBU RAYA
				3	27	02	2,02	0003	Pemanfaatan SDG Hewan/Tanaman	Jumlah Pemanfaatan SDG Hewan/Tanaman	Dokumen	1	1	Rp 240.000.000	1	Rp 300.000.000	2	Rp 540.000.000	DKPP KKR	KUBU RAYA

				3	2	0	2,	00	Penjaminan Kemurnian dan Kelestarian SDG Tanaman	Jumlah SDG tanaman yang dilakukan pelestarian dan pemurnian	Varieta s Unggul Baru (VUB)	1	1	Rp 170.997.404	1	Rp 195.997.404	2	Rp 366.994.808	DKPP KKR	KUBU RAYA
				3	2	0			<b>PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBAN GAN PRASARANA PERTANIAN</b>	<b>Daya dukung prasarana pertanian terhadap produktivita s pertanian (%)</b>	%			<b>Rp 1.235.191.45 0</b>		<b>Rp 1.260.191.45 0</b>	0	Rp 2.495.382.900	DKPP KKR	KUBU RAYA
				3	2	0	2,		<b>Pengembang an Prasarana Pertanian</b>	<b>Jumlah Laporan Pengemban gan Prasarana Pertanian (Laporan)</b>	<b>Lapora n</b>		1	<b>Rp 1.235.191.45 0</b>	<b>Rp 1</b>	<b>Rp 1.260.191.45 0</b>	2	<b>Rp 2.495.382.90 0</b>	<b>DKPP KKR</b>	<b>KUBU RAYA</b>
				3	2	0	2,	00	Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya	Lapora n	1	1	Rp 146.191.450	1	Rp 171.191.450	2	Rp 317.382.900	DKPP KKR	KUBU RAYA
				3	2	0	2,	00	Pengendalian dan Pemanfaatan Prasarana Pascapanen Tanaman Pangan	Jumlah prasarana pascapanen tanaman pangan yang dikendalikan dan dimanfaatka n	Unit		12	Rp 39.000.000	12	Rp 39.000.000	24	Rp 78.000.000	DKPP KKR	KUBU RAYA
				3	2	0	2,	00	Pengendalian dan Pemanfaatan Prasarana Pengolahan Hasil Tanaman Pangan	Jumlah prasarana pengolahan hasil tanaman pangan yang dikendalikan	Unit		6	Rp 1.050.000.000	6	Rp 1.050.000.000	12	Rp 2.100.000.000	DKPP KKR	KUBU RAYA

										dan dimanfaatkan										
				3	27	03	2,02		Pembangunan Prasarana Pertanian	Jumlah Laporan Pembangunan Prasarana Pertanian (Laporan)	Laporan	1	1	Rp 7.300.000.000	1	Rp 7.500.000.000	2	Rp 14.800.000.000	DKPP KKR	KUBU RAYA
				3	27	03	2,02	0002	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Embung Pertanian	Jumlah Embung Pertanian yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara	Unit	0	2	Rp 400.000.000	2	Rp 400.000.000	4	Rp 800.000.000	DKPP KKR	KUBU RAYA
				3	27	03	2,02	0003	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani	Jalan Usaha Tani yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara	Unit	21	15	Rp 3.000.000.000	15	Rp 3.000.000.000	30	Rp 6.000.000.000	DKPP KKR	KUBU RAYA
				3	27	03	2,02	0004	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan DAM Parit	Jumlah DAM Parit yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara	Unit	0	2	Rp 400.000.000	2	Rp 400.000.000	4	Rp 800.000.000	DKPP KKR	KUBU RAYA
				3	27	03	2,02	0008	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Balai Penyuluh di Kecamatan serta Sarana Pendukungnya	Jumlah Balai Penyuluh di Kecamatan serta Sarana Pendukungnya yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara	Unit	0	2	Rp 1.100.000.000	2	Rp 1.300.000.000	4	Rp 2.400.000.000	DKPP KKR	KUBU RAYA

				3	2	0	2,02	0009	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya	Jumlah Prasarana Pertanian Lainnya yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara	Unit	3	8	Rp 1.600.000.000	8	Rp 1.600.000.000	16	Rp 3.200.000.000	DKPP KKR	KUBU RAYA
				3	2	0	2,02	0010	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Usaha Tani	Jumlah jaringan irigasi usaha tani yang direhabilitasi	Unit	0	4	Rp 800.000.000	4	Rp 800.000.000	8	Rp 1.600.000.000	DKPP KKR	KUBU RAYA
				3	2	0	5		<b>PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN</b>	<b>Persentase Perlindungan Pertanian (%)</b>	%	70	70	Rp 464.000.000	80	Rp 549.000.000	80	Rp 1.013.000.000	<b>DKPP KKR</b>	<b>KUBU RAYA</b>
				3	2	0	2,01		<b>Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/ Kota</b>	<b>Jumlah Laporan Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/ Kota (Laporan)</b>	<b>Laporan</b>	1	1	Rp 464.000.000	1	Rp 549.000.000	2	Rp 1.013.000.000		
				3	2	0	2,01	0001	Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	Jumlah Luas Serangan Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan yang Dikendalikan	Ha	200	300	Rp 343.000.000	500	Rp 403.000.000	800	Rp 746.000.000	DKPP KKR	KUBU RAYA



				3	2	0	2,01	0002	Penanganan Dampak Perubahan Iklim (DPI) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	Jumlah Area Terdampak Perubahan Iklim (DPI) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan yang Ditangani	Ha	600	40	Rp 121.000.000	50	Rp 146.000.000	90	Rp 267.000.000	DKPP KKR	KUBU RAYA
				3	2	0	7		<b>PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN</b>	<b>Cakupan Bina Kelompok Tani</b>	%	100	100	Rp 867.000.000	100	Rp 1.305.000.000	200	Rp 2.172.000.000	<b>DKPP KKR</b>	<b>KUBU RAYA</b>
				3	2	0	7	2,01	<b>Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian</b>	<b>Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian</b>	<b>laporan</b>	1	1	Rp 867.000.000	1	Rp 1.305.000.000	2	Rp 2.172.000.000	<b>DKPP KKR</b>	<b>KUBU RAYA</b>
				3	2	0	7	2,01	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa	Jumlah Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya	Unit	9	9	Rp 450.000.000	9	Rp 540.000.000	18	Rp 990.000.000	DKPP KKR	KUBU RAYA
				3	2	0	7	2,01	Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa	Jumlah Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya	Unit	16	30	Rp 150.000.000	48	Rp 420.000.000	78	Rp 570.000.000	DKPP KKR	KUBU RAYA
				3	2	0	7	2,01	Penyediaan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana	Jumlah Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian	Unit	1	9	Rp 90.000.000	9	Rp 135.000.000	18	Rp 225.000.000	DKPP KKR	KUBU RAYA

									Penyuluhan Pertanian											
				3	2 7	0 7	2, 0 1	00 06	Penyediaan dan Peningkatan Kapasitas Penyuluh pertanian	Jumlah penyuluh pertanian yang tersedia dan ditingkatkan kapasitasnya	Orang		59	Rp 177.000.000	60	Rp 210.000.000	119	Rp 387.000.000	DKPP KKR	KUBU RAYA

**BAB 7. KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN**

**7.1. Indikator Sasaran dan Definisi Operasional**

**7.1.1. Indikator Sasaran 2025-2026**

Tabel 23. Indikator Kinerja Utama

No	Sasaran	Indikator Sasaran	Satuan	Kondisi Awal 2023	Target 2025	Target 2026
1	Meningkatkan Ketahanan pangan kabupaten Kubu Raya	Skor PPH	Poin	72,67	70,04	82,27
2	Meningkatnya Kesejahteraan Petani	PDRB Sektor Pertanian	Rupiah	-	580.000.000	590.000.000
3	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan	Nilai SAKIP SKPD	Poin	-	66	67

**7.1.2. Definisi Operasional**

**1. Skor PPH**

Skor PPH merupakan indikator mutu gizi dan keragaman konsumsi pangan sehingga dapat digunakan untuk merencanakan kebutuhan konsumsi pangan. Skor PPH maksimal adalah 100. Semakin tinggi skor PPH, maka semakin beragam dan seimbang konsumsi pangan penduduk. Pendekatan yang dilakukan untuk justifikasi penghitungan skor Pola Pangan Harapan (PPH) adalah dengan menggunakan rasio pengeluaran riil setiap kelompok pangan. Pengeluaran riil dihitung berdasarkan pengeluaran nominal kelompok pangan yang dikoreksi dengan Indek Harga Konsumen. Angka IHK yang digunakan merupakan IHK rata-rata dari IHK setiap bulan selama satu tahun. Untuk justifikasi data provinsi, IHK tiap provinsi didekati dengan menggunakan perhitungan tertimbang dari IHK di 66 kabupaten/kota (tahun dasar 2007 = 100) tahun 2009-2013, dan IHK di 82 kabupaten/kota tahun 2014-2015 (tahun dasar 2012 = 100). Justifikasi tersebut digunakan terhadap data Susenas (modul konsumsi) selama masih ditemukan ketidakkonsistenan data Susenas dalam penilaian kuantitas dan kualitas konsumsi pangan dengan kaidah dan teori yang terkait konsumsi pangan

## **2. PDRB Sektor Pertanian**

PDRB pada dasarnya merupakan jumlah nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh unit usaha dalam suatu daerah tertentu, atau merupakan jumlah nilai barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh seluruh unit ekonomi. PDRB atas dasar harga berlaku menggambarkan nilai tambah barang dan jasa yang dihitung menggunakan harga pada tahun berjalan, sedang PDRB atas dasar harga konstan menunjukkan nilai tambah barang dan jasa tersebut yang dihitung menggunakan harga yang berlaku pada satu tahun tertentu sebagai tahun dasar, sebagai contoh perhitungan PDB dan PBRB di Indonesia menggunakan tahun dasarnya yaitu tahun 2000.

Penentuan PDRB atas harga konstan, biasanya diperlukan untuk mengeluarkan pengaruh inflasi. PDRB menurut harga berlaku digunakan untuk mengetahui kemampuan sumber daya ekonomi, pergeseran, dan struktur ekonomi suatu daerah. Sementara itu, PDRB konstan digunakan untuk mengetahui pertumbuhan ekonomi secara riil dari tahun ke tahun atau pertumbuhan ekonomi yang tidak dipengaruhi oleh faktor harga. PDRB juga dapat digunakan untuk mengetahui perubahan harga dengan menghitung deflator PDRB (perubahan indeks implisit). dimana Indeks harga implisit merupakan rasio antara PDRB menurut harga berlaku dan PDRB menurut harga konstan.

PDRB sub sektor pertanian yang dihitung adalah PDRB sub sektor pertanian (tanpa kehutanan dan perikanan) yang terdiri dari (1) tanaman pangan; (2) tanaman hortikultura semusim; (3) tanaman hortikultura tahunan dan lainnya; (4) peternakan dan (5) jasa pertanian dan perburuan.

## **3. Nilai SAKIP SKPD**

Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah atau SAKIP adalah rangkaian sistematis dari berbagai aktivitas, alat, dan prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan kinerja dan pengukuran, pengumpulan data, pengklasifikasian, pengikhtisaran, dan pelaporan kinerja pada instansi pemerintah, dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah. (Perpres 29 Tahun 2014). Setiap pimpinan instansi pemerintah / kepala daerah melakukan evaluasi AKIP di lingkungannya masing-masing setiap tahun dengan

kebijakan masing-masing mengacu Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2022 yang bertujuan untuk perbaikan manajemen kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja khususnya dalam mencapai target kinerja yang telah ditetapkan secara berkelanjutan.

Penilaian SAKIP SKPD melalui pengisian jawaban yang dilakukan pada sub-komponen, setiap sub-komponen dinilai berdasarkan pemenuhan kualitas dari kriteria, dengan pilihan jawaban AA / A / BB / CC / C / D / E sesuai dengan gradasi nilai, sebagai berikut: (1) AA dengan nilai 100; (2) A dengan nilai > 90; (3) BB dengan nilai > 80; (4) B dengan nilai > 70; (5) CC dengan nilai > 60; (6) C dengan nilai > 50; (7) D dengan nilai > 30; dan (8) E dengan nilai > 0.

### 7.2. Indikator Program dan Definisi Operasional

#### 7.2.1. Indikator Program

Indikator Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan dibagi menjadi dua jenis yaitu indikator strategis dan indikator penunjang. Indikator strategis menjadi tanggung jawab bidang ketahanan pangan, bidang prasarana dan sarana pangan, bidang tanaman pangan, bidang hortikultura, bidang peternakan dan bidang penyuluhan. Indikator penunjang menjadi tanggung jawab sekretariat.

Tabel 24. Indikator Program DKPP 2025-2026.

No.	Indikator Kinerja Kunci	Satuan	Kondisi Awal 2023	Target Tahun	
				2025	2026
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	%	-	100	100
	Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian	Ton/Ha	2,86	3	3,1
	Program Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian	%	100	100	100

	Program Pengendalian Dan Penanggulangan Bencana Pertanian	%			
	Program Penyuluhan Pertanian	%		5	10
	Program Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi Untuk Kedaulatan Dan Kemandirian Pangan	Unit		1	1
	Program Peningkatan Diversifikasi Dan Ketahanan Pangan Masyarakat	Poin	72,67	70,04	82,27
	Program Penanganan Kerawanan Pangan	Poin	16	12	10
	Program Pengawasan Keamanan Pangan	%	100	100	100

7.2.2. Definisi Operasional

1   Persentase Kualitas Kegiatan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Kualitas kegiatan penunjang urusan pemerintahan daerah diukur berdasarkan jumlah surat-surat yang berasal dari Kementerian / Lembaga / Daerah / Perangkat Daerah Lain yang berhasil ditindaklanjuti oleh Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian.

Sumber data : Jumlah Surat Keluar Pada Agenda Surat Keluar

2   Produktivitas Pertanian

Produktivitas pertanian adalah kemampuan suatu areal lahan pertanian dalam menghasilkan produk-produk hasil pertanian. Produktivitas yang dihitung dalam mengukur kinerja pertanian adalah produktivitas padi sawah dan ladang dengan rumus sebagai berikut:

Produktivitas Pertanian	=	Produksi Padi Selama 1 Tahun (Ton)
		Luas Tanam Selama 1 Tahun (Ha)

Sumber data: Statistik Pertanian Badan Pusat Statistik Kabupaten.

3 Daya dukung prasarana pertanian terhadap produktivitas pertanian

Daya dukung prasarana pertanian terhadap produktivitas pertanian dihitung dengan membandingkan jumlah proposal pengajuan alat mesin dengan jumlah alat mesin yang dihibahkan.

Daya dukung prasarana pertanian terhadap produktivitas pertanian	=	Jumlah proposal pengajuan alat mesin (Berkas)	x 100%
		Jumlah Alat Mesin Yang D hibahkan (Unit)	

Sumber data: Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian

4 Persentase Perlindungan Pertanian

Persentase perlindungan pertanian diukur dengan membandingkan jumlah kasus serangan organisme pengganggu tanaman dengan jumlah penanganan yang telah dilakukan oleh POPT dengan rumus sebagai berikut.

Persentase Perlindungan Pertanian	=	Jumlah Kasus Yang Terjadi Tahun Ini (Laporan)	x 100%
		Jumlah Penanganan Yang Telah Dilakukan Tahun Ini (Laporan)	

Sumber data : Pengendali Organisme Pengganggu Tanaman (POPT)

5 Persentase Kelompok Tani Pertanian Yang Dibina

Persentase kelompok tani yang terbina diukur dengan membandingkan antara jumlah poktan yang mengajukan RDKK dengan jumlah poktan yang terfasilitasi penyusunan RDKK nya oleh PPL dengan rumus sebagai berikut.

Cakupan Bina Kelompok Tani	=	Jumlah Poktan Yang Menerima Bantuan	x 100%
----------------------------	---	-------------------------------------	-----------

	Jumlah Poktan Kabupaten Kubu Raya	
--	-----------------------------------	--

Sumber data: Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian

### 6 Indeks Ketersediaan Pangan Kabupaten

Indeks Ketersediaan Pangan Kabupaten diukur dengan melihat nilai indeks komposit dengan kriteria cukup tahan (prioritas 4) pada perhitungan Peta Ketahanan dan Kerentanan *Pangan* atau Food Security and Vulnerability Atlas (*FSVA*) sebagai berikut.

Prioritas	Indeks Komposit	Kriteria
1	>39,68	Sangat Rentan
2	>39,68 – 47,90	Rentan
3	>47,90 – 54,11	Cukup Rentan
4	>54,11 – 60,82	Cukup Tahan
5	>60,82 – 67,84	Tahan
6	>67,84	Sangat Tahan

Sumber data : Dokumen FSVA DKPP Kabupaten Kubu Raya

### 7 Skor Pola Pangan Harapan.

Skor PPH merupakan indikator mutu gizi dan keragaman konsumsi pangan sehingga dapat digunakan untuk merencanakan kebutuhan konsumsi pangan. Skor PPH maksimal adalah 100. Semakin tinggi skor PPH, maka semakin beragam dan seimbang konsumsi pangan penduduk.

Pendekatan yang dilakukan untuk justifikasi penghitungan skor Pola Pangan Harapan (PPH) adalah dengan menggunakan rasio pengeluaran riil setiap kelompok pangan. Pengeluaran riil dihitung berdasarkan pengeluaran nominal kelompok pangan yang dikoreksi dengan Indek Harga Konsumen. Angka IHK yang digunakan merupakan IHK rata-rata dari IHK setiap bulan



selama satu tahun. Untuk justifikasi data provinsi, IHK tiap provinsi didekati dengan menggunakan perhitungan tertimbang dari IHK di 66 kabupaten/kota (tahun dasar 2007 = 100) tahun 2009-2013, dan IHK di 82 kabupaten/kota tahun 2014-2015 (tahun dasar 2012 = 100). Justifikasi tersebut digunakan terhadap data Susenas (modul konsumsi) selama masih ditemukan ketidakkonsistenan data Susenas dalam penilaian kuantitas dan kualitas konsumsi pangan dengan kaidah dan teori yang terkait konsumsi pangan.

Skor PPH	=	Skor PPH Padi-Padian (1) + Skor PPH Umbi-Umbian (2) + Skr PPH Pangan Hewani (3) + Skor PPH Minyak dan Lemak (4) + Skor PPH Buah/ Biji Berminyak (5) + Skor PPH Kacang-Kacangan (6) + Skor PPH Gula (7) + Skor PPH Sayur dan Buah (8) + Skor PPH Lain-Lain (9)
----------	---	---

Sumber data : Undang-Undang (UU) Nomor 18 tahun 2012 tentang Pangan dan 2 Badan Ketahanan Pangan - Kementerian Pertanian Peraturan Pemerintah No 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi.

### 8 Tingkat Kerawanan Pangan

Tingkat kerawanan pangan diukur dengan melihat nilai indeks komposit dengan kriteria sangat rentan (prioritas 1) pada perhitungan Peta Ketahanan dan Kerentanan *Pangan* atau Food Security and Vulnerability Atlas (*FSVA*) sebagai berikut.

Prioritas	Indeks Komposit	Kriteria
1	<= 39,68	Sangat Rentan
2	>39,68 – 47,90	Rentan
3	>47,90 – 54,11	Cukup Rentan
4	>54,11 – 60,82	Cukup Tahan
5	>60,82 – 67,84	Tahan
6	>67,84	Sangat Tahan

Sumber data : Dokumen FSVA DKPP Kabupaten Kubu Raya

9 Persentase Kasus Pangan Yang Tidak Sesuai Standar Mutu Yang Telah Ditetapkan.

Persentase Kasus Pangan Yang Tidak Sesuai Standar Mutu Yang Telah Ditetapkan diukur dengan membandingkan antara jumlah permohonan yang diajukan dengan jumlah rekomendasi yang diberikan dengan rumus sebagai berikut:

Persentase Kasus Pangan Yang Tidak Sesuai Standar Mutu Yang Telah Ditetapkan	=	Jumlah Permohonan	x 100%
		Jumlah Sampel Yang Diuji	

Sumber data : Pengawas Mutu dan Hasil Pertanian (PMHP)

## **BAB 8. PENUTUP**

### **8.1. Kesimpulan.**

1. Rencana Strategis Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Tahun 2025-2026 berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 untuk memberikan arah sekaligus menjadi acuan dalam melaksanakan urusan pemerintah daerah bidang tanaman pangan, hortikultura, pengembangan prasarana dan sarana serta penyuluhan.
2. Program dan Kegiatan merupakan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Kubu Raya Kedepan.
3. Perincian lebih lanjut tentang program, kegiatan, indikator *out put* kegiatan, kondisi awal dan target yang memuat pagu indikatif Renstra Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Tahun 2025-2026 sesuai dengan Matrik.

### **8.2. Penutup.**

1. Renstra Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Tahun 2025-2026 sebagai arah dan pedoman seluruh Unit Kerja di Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Kubu Raya kedepan.
2. Dokumen Renstra ini secara normatif telah diupayakan memuat program dan Rencana Kerja dan seluruh tugas Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Kubu Raya.
3. Untuk mengendalikan dan menjaga konsistensi pelaksanaan dokumen Renstra maka diperlukan monitoring dan evaluasi oleh masing-masing Unit Kerja di Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Kubu Raya. Hal ini terkait dengan pentingnya pengawasan internal dan penerapan prinsip-prinsip tata pemerintahan yang baik (*good governance*).